

LAPORAN AKHIR TAHUN KINERJA PN GUNUNG SUGIH DESEMBER 2019

Jumlah Putus Perkara Pidana, Perdata, Permohonan, Eksekusi, Konsinyasi, Tren Kejahatan dan Sengketa, Performa Pengadilan, Daya Serap Anggaran,



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Jalan Negara No. 100 Gunung Sugih Telp. (0725) 529858-529859 Fax. (0725) 529859.

Website: www.pn-gunungsugih.go.id Email: gunungsugihpn@gmail.com
Gunung Sugih - Kab. Lampung Tengah

DAFTAR ISI

	LAMAN JUDUL	1
	FTAR ISI	2
	TA PENGANTAR	3
BA	B I PENDAHULUAN	4
A.	Latar Belakang	4
	Tujuan dan Manfaat	5
	B IÍ GAMBARAN KEADAAN	
DA	N LAPORAN PENANGANAN PERKARA	8
A.	Kinerja Sekarang	8
	Laporan Penanganan Perkara	
	Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Gunung S Tahun 2019	
2	Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2018	
3.		rkar
4.	Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019	
5.	Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2 berdasarkan klasifikasi perkara	2019
6.	Data Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Gur Sugih Tahun 2019	านท
7.	Data Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2 Berdasarkan klasifikasi	2019
8.		านทดู
9.	Rerata waktu Penanganan Perkaa pada Pengadilan di Pengadilan Negeri Gunung Su	aih
	Rerata waktu Penanganan Perkara Gugatan Seerhana	3
	. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Ta 2019	ahur
12.	. Rekapitulasi Data Uang Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2019 p Pengadilan Negeri Gunung Sugih	oada
13.	. Rekapitulasi Data Uang Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pid Tertentu	anat
14.	. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Ta 2018	ahur
15.	Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri Gur	านท
ДΛ	Sugih Tahun 2019 B III. KINERJA EVALUASI SIPP	24
		21
	B IV DAYA SERAP ANGGARAN	27
Day	ya Serap Anggaran	27
	B V PELAYANAN INFORMASI	29
	ayanan informasi	29
	B VI INOVASI	56
	vasi	56
	B VII PENUTUP	
	Kesimpulan	
В	Rekomendasi	61

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur disampaikan kehadirat Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pn Gunung Sugih Periode Januari sampai dengan Desember 2018 telah diselesaikan.

Laporan ini merupakan suatu gambaran tentang pelaksanaan kinerja seluruh kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II Periode Januari sampai dengan Desember 2019 dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Lampung Tengah.

Penyusunanan Laporan ini dibuat berdasarkan fakta dan data yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam hal Jumlah perkara pidana dan perdata yang diputus, Permohonan, Eksekusi, Konsinyasi, Tren Kejahatan dan Sengketa, Performa Pengadilan, Daya Serap Anggaran, Inovasi dan Bakti Sosial PN Gunung Sugih. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi baik untuk kepentingan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pemerintah Kabupaten Daerah Lampung Tengah dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan.

Demikian Laporan Tahunan ini disampaikan semoga data dan fakta yang tersaji dapat memberi manfaat buat kita semua. Semoga apa yang telah dan akan kita lakukan dimasa mendatang selalu mendapat ridho dari Allah Subhana Wa Ta'ala.

Gunung Sugih, Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

SYAMSUL ARIEF, SH.,MH Nip. 197602241999031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini masyarakat sudah semakin menyadari dan memahami hak dan kedudukannya sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas dari setiap penyelenggara layanan publik di Indonesia. Hal ini sudah tentu perlu disikapi secara bijak oleh penyelenggara layanan publik dengan mengambil langkah kegiatan yang terus-menerus, terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya dalam rangka membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan landasan hukum yang menentukan tentang bagaimana sistem pelayanan publik seharusnya dijalankan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan pembangunan nasional. Hal ini sudah tentu membawa konsekuensi logis terhadap setiap penyelenggara layanan publik untuk terus menerus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan juga sebagai peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya mempunyai posisi dan peran strategis dalam mewujudkan organisasi peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka penegakan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai salah satu Garda depan Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan umum dituntut pula memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan dalam wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karena itulah Pimpinan bersama-sama dengan jajaran Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan berbagai kerja dan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.

Kerja dan Inovasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sudah dimulai dan ditampilkan sejak para Pencari Keadilan memasuki halaman Gedung Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Kebersihan dan keasrian halamandan gedung Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjadi perhatian yang sangat penting bagi peningkatan mutu pelayanan. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari respon keinginan pimpinan Mahkamah Agung yang menginginkan peforma badan peradilan dibawahnya menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sugih banyak melakukan perubahan. Sejak bulan Maret 2018 atau sejak dilantiknya Ketua PN yang baru, Syamsul Arief S.H. M.H, dilakukan perubahan kearah lebih baik. Adapun kerja

daninovasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

- 1. Perbaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 2. Akses Pintu Elektronik
- 3. Penambahan Jaringan Internet dan Peningkatan Kinerja SIPP
- 4. Perubahan Ruangan Kepaniteraan
- 5. Ruang rapat baru
- 6. Ruang Tunggubaru
- 7. Ruang Laktasi dan Lingkungan Ramah Anak
- 8. Penyempurnaan taman
- 9. Penyempurnaan jalur difabel
- 10. Pengecatan Ulang dan Menjaga Kebersihan LingkunganKantor PN Gunung Sugih
- 11. Penyempurnaan Ruang Sekretariat APM-RB
- 12. Pembuatan Aplikasi Informasi Perkara
- 13. Pembuatan Aplikasi Antrian PTSP
- 14. Pembuatan Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kegiatan inovasi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perbaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan surat, pelayanan pelimpahan berkas perkara, baik pelimpahan perkara perdata maupun perkara pidana, pelayanan izin sita, penggeledahan, penahanan, diversi, pelayanan pendaftaran CV, dan lainnya;
- 2. Akses Pintu Elektronik dibuat sebanyak 5 (lima) pintu yaitu 3 (tiga) pada bagian depan dan 2 (dua) pada bagian belakang. Hal itu bertujuan untuk membatasi antara ruangan yang dapat diakses oleh pegawai atau pencari keadilan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari sterilisasi ruangan agar baik Hakim maupun seluruh pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak dapat secara bebas berhubungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Sehingga pencari keadilan hanya terhubung dengan Petugas pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) di lobby Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih saja.
- Penambahan Jaringan Internet dan Peningkatan Kinerja SIPPdilakukan untuk meningkatan kinerja jaringan nirkabel telekomunikasi melalui pemasangan Hotspot /Wifi gratis bagi publik dan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pelayanan publik terkait Sistem Informasi Penanganan Perkara.
- 4. Perubanan Display ruangan Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum yang awalnya berada terpisah dan berada di wilayah ruang persidangan yang dapat di

- akses oleh public kemudian dirubah dengan dipindahkan ruangan Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum tersebut secara terpadu di bagian depan Gedung Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tidak dapat di akses secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan sehingga meminimalisir para staf pegawai Kepaniteraan terhubung langsung dengan masyarakat umum.
- 5. Pembuatan ruang rapat baru di lantai satu pengadilan Negeri Gunung Sugih bukan saja dapat dipakai sebagai ruang rapat internal bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih akan tetapi ruang rapat tersebut dapat di pakai sebagai ruang guna pelaksanan Mediasi, Diversi dan Ruang Rapat bagi Pimpinan Pengadilan dan Jajaran bertemu dengan Pihak Perguruan Tinggi, Wartawan dan Masyarakat lainnya.
- 6. Ruang Tunggu pengunjung sidang dibuat dan disempurnakan di bagian belakang Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Perbaikan Ruang Tunggu tersebut di buat sedemikian rupa sehingga memberikan efek kenyamanan baik para pengunjung masyarakat pencari keadilan maupun Pihak Penuntut Umum, Kepolisian, Advokat dalam melaksanakan tugasnya.
- 7. Ruang Laktasi sengaja dibuat sebagai bentuk apresiasi terhadap kaum perempuan yang sedang menyusui sehingga ibu mendapat ruang privasi bagi dirinya untuk bisa menyusui anaknya secara nyaman meskipun berada di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Adapun ruang laktasi ini terhubung dengan ruang ramah anak dimana ada Ruang Ramah Anak disediakan perlengkapan arena bermain anak berupa wahana berayun dan meluncur
- 8. Penyempurnaan taman di halaman Pengadilan Negeri Gunung Sugih baik di depan dan juga belakang dibuat asri dan indah, hal ini sebagai bagian dari prinsip Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang pro lingkungan dan mendukung semangat Go Green. Taman yang di bangun di halaman muka pagar Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih kini sudah di penuhi dengan tumbuhan kacang hias bunga kuning (yellow Pinto Peanut), pisang-pisangan (heliconia), bunga reulia ungu, Rumput Putih Lili Paris (clorophytum comosum) dan Bunga Taiwan Beauty (Cuphea hyssopifolia). Taman muka Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berada persis di depan jalan lintas Sumatera kini terlihat taman paling indah pada halaman kantor publik di Wilayah Lampung Tengah. Demikian pula ketika pencari keadilan memasuki halam dalam di sekitar halaman belakang Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih kini telah di tata bunga dan pohon hias serta telah ditanami pohon-pohon buah favorit masyarakat Indonesia.
- 9. Penyempurnaan jalur difabel menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih juga siap melayani dan mengaprisiasi masyarakat pencari keadilan dengan keterbatasan fisik, hal itu menunjukan bahwa komitmen Pengadilan Negeri Gunung Sugih menegakan prinsip keadilan bagi semua (*Justice For all*)

- 10. Pengecatan Ulang dan Menjaga Kebersihan Lingkungan Kantor PN Gunung Sugih dilakukan rutin secara periodik baik setiap hari maupun setiap 3 (tiga) bulan dilakukan termasuk penataan letak pot-pot bunga. Hal itu dilakukan guna memberikan suasana yang lebih nyaman bagi para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
- 11. Penyempurnaan Ruang Sekretariat APM-RB dilakukan guna memberikan akses terbaik bagi staf pegawai maupun pimpinan guna melakukan monitoring dan mempelajari dokumen-dokumen ICPE;
- 12. Penyempurnaan Aplikasi Informasi Perkara dilakukan baik dalam hal tataletak display maupun update jadwal persidangan yang terhubung langsung dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sehingga masyarakat pencari keadilan yang berada di ruang lobby tepat berada di depan ruang PTSP dapat langsung melihat jadwal persidangan maupun data perkara baik pidana maupun perdata yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
- 13. Aplikasi Antrian PTSP yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih terlihat pada Display Standing Monitor tepat berada di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Aplikasi dan alat ini dipasang meyerupai alat yang sama pada Kantor-kantor pelayanan publik yang mengedepankan pelayanan secara prima sehingga potensi pengunjung dalam jumlah banyak dapat diatasi dengan system antrian yang di buat. Sehingga system antrian sebagai bentuk budaya yang mengandung nilai-nilai penghormatan dan ketertiban.
- 14. Pembuatan Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan adalah bentuk dan upaya Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mendapatkan Umpan balik dari pengunjung atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Sehingga Pengadilan Negeri Gunung Sugih dapat terus menerus memperbaiki setiap pelayanan yang sudah diberikan dan pimpinan Pengadilan dapat melakukan Evaluasi secara maksimal.

Adapun manfaat yang diharapkan dari kegiatan inovasi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan surat, pelayanan izin penggeledahan, pelayanan pendaftaran CV, dan lainnya;
- 2. Terciptanya keamanan bagi para pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- 3. Terciptanya pelayanan perkara yang cepat dan transparan;
- 4. Terciptanya keamanan bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- 5. Terciptanya suasanan nyaman saat rapat;
- 6. Tersedianya ruang tunggu kepada Pengunjung sidang, Penuntut Umum dan Advokat dalam melaksanakan tugasnya;
- 7. Terciptanya suasana nyaman dan aman bagi wanita yang sedang menyusui dan anak-anak.

- 8. Terciptanya suasana yang lebih nyaman bagi para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- 9. Terpenuhinya pelayanan masyarakat, khususnya bagi para Difabel;
- 10. Terciptanya suasana yang lebih nyaman bagi para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.;
- 11. Terwujudnya kemudahan untuk semua pihak di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk melihat dan mempelajari dokumen-dokumen ICPE;
- 12. Memudahkan pengunjung dalam mendapatkan informasi akurat terkini tentang perkara yang diterima /diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih.;
- 13. Memberikan Pelayanan terbaik dalam hal cara dan waktu pelayanan.
- 14. Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengetahui segera hasil pelayanan/masukan/kritik dan apresiasi dari pengunjung.;

BAB II GAMBARAN KINERJA DAN PENANGANAN PERKARA

A. Kinerja Sekarang

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor :1505/DJU/SK/OT.01.3/7/2018 dengan Akreditasi A dari Direktorat Peradilan Umum diBalikpapan tanggal13 Juli 2018

Hal ini merupakan bentuk penilaian sekaligus pengakuan yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI terhadap standar kinerja dan kualitas pelayanan yang selama ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Selain dari pada itu Pengadilan Negeri Gunung Sugih juga meraih terbaik kelima dalam penilaian display pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) level Pengadilan Negeri Kelas II seluruh Indonesia pada Perlombaan PTSP di Nusa Bali tanggal 10 September 2018

Demikian pula Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah di fasilitasi program aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan aplikasi E-SKUM serta ECOURTyang mana telah dicanangkan Mahkamah Agung dan telah diaplikasikan di beberapa Pengadilan Negeri.





B. LAPORAN PENANGANAN PERKARA

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih

1. Gambaran Umum Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

No.	Jenis	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1.	Pidana(Anak, Dewasa, Pra Peradilan, Cepat, Singkat dan Pelanggaran Lalu Lintas)	70	1247 (Pidana : 488 Pelanggaran Lalu lintas : 759	558	554	4
2.	Perdata	10	77	87	75	12
	Jumlah	80	564	644	629	16

2. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019			Sisa 2019
1.	Pidana Biasa	70	447	517	513	4
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat	-	2	2	2	-
4.	Pidana Anak	-	33	33	33	-
3.	Pra Peradilan	-	6	6	6	-
	Jumlah	70	488	558	554	4

3. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Sisa 2019
1.	Informasi dan	=	2	2	2	-
	Transaksi Elektronik					
2.	Kejahatan Perjudian	2	5	7	7	-
3.	Kejahatan terhadap	-	-	-	-	-
	Asal Usul					
	Perkawinan					
4.	Kejahatan Terhadap	1	1	2	2	-
	kesusilaan					
5.	Kejahatan Terhadap	-	-	-	-	-
	Nyawa					
6.	Pemalsuan Surat	-	1	1	1	-
7.	Pemerasan dan	-	-	-	-	-
	Pengancaman					
8.	Penadahan,	4	26	30	30	-
	Penerbitan, dan					
	Pencetakan					
9.	Pencurian	23	164	187	186	1
10.	Penganiayaan	5	9	14	14	-
11.	Penggelapan	2	14	16	16	-
12.	Penghancuran atau	1	-	1	1	-
	Perusakan Barang					
13.	KDRT	2	3	5	5	-
14.	Kesehatan	-	-	-	-	-
15.	Lain-lain	-	3	3	3	-

16.	Lalu Lintas	1	3	4	4	-
17.	Kerusakan	8	1	9	9	-
	Lingkungan Akibat					
	kegiatan					
	Pertambangan					
	(mineral,Batu,Bara),					
	Minyak dan Gas					
	Bumi					
18.	Konservasi Sumber	-	1	1	1	-
	Daya Alam					
19.	Penebangan Kayu	1	1	2	2	-
20.	Narkotika	15	143	158	157	1
21.	Pembunuhan	-	2	2	1	1
22.	Pengancaman	-	11	11	11	-
23.	Penipuan	1	21	22	21	1
24.	Perbankan Syariah	-	-	-	-	-
	Negara					
25.	Perbuatan Tidak	1	-	1	1	-
	Menyenangkan					
26.	Perlindungan Anak	-	19	19	19	-
27.	Perubahan Atas	-	-	-	-	-
	Undang-Undang					
	Nomor 31 tahun					
	2004 tentang					
	perikanan					
28.	Tindak Pidana	3	17	20	20	-
	Senjata Apiatau					
	Benda Tajam					
	Jumlah	70	447	517	512	4

4. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2019

No.	Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa
1.	Perdata Gugatan	9	45	54	46	=	8
2.	Perdata Permohonan	1	16	16	16	-	-
3.	Gugatan Sederhana	1	15	16	13	1	3
4.	Perlawanan (Derden Verzet)	-	1	1	-	-	1
5.	Niaga	-	-	-	=	=	-
6.	Perselisihan Hubungan Industri	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		77	87	75	0	12

5. Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019 berdasarkan klasifikasi perkara

No.	Klasifikasi	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1.	PMH	4	14	18	14	-	4
2.	Wanprestasi	1	5	6	4	-	1
3.	Perceraian	3	24	27	25	ī	3

4.	Objek Sengketa	1	1	2	1	-	1
	Tanah						
5.	Harta bersama	-	1	1	-	-	-
6.	Ganti rugi	-	2	2	-	-	-
	Jumlah		47	56	47	0	9

6. Data Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

No.	Jenis	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1.	PBSK	-	-	-	-	-	-
2.	Partai Politik	-	ı	=	ı	=	-
3.	KPPU	-	-	-	-	-	-
4.	Pembatalan Arbitrase	-	-	-	-	-	-
5.	Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-
	Jumlah						

7. Data Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2019 Berdasarkan klasifikasi

No.	Klasifikasi	Sisa	Sisa Masuk Jumlah Beban Puti		Putus	Cabut 2019	Sisa
1.	Ganti Nama	-	6	6	6	-	-
2.	Adopsi	-	1	1	1	-	-
3.	Perwalian	-	2	2	2	-	-
4.	Perbaikan	-	5	5	5	-	-
	Identitas						
	Jumlah		11	11	11	•	-

8. Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut 2019	Sisa 2019
1.	HAM	-	-	-	-	-	-
2.	Tipikor	-	=	=	ı	ı	-
3.	Perikanan	-	=	=	ı	ı	-
4.	PHI	-	-	-	-	-	-
5.	Niaga	-	-	-	-	-	-
	Jumlah						

9. Rerata waktu Penanganan Perkaa pada Pengadilan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

No.	Jenis	Rerata Waktu memutus (dalam bulan)								
IVO.		1	2	3	4	5	6	6-12	>12	
1.	Perkara Gugatan	3	7	10	7	3	2	1	-	-
2.	Perkara	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	Permohonan									
3.	Perkara Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Perkara Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	PHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pidana Biasa	154	241	59	2	1	-	-	-	-

7.	Tipikor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Perikanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rerata									

10. Rerata waktu Penanganan Perkara Gugatan Sederhana

			Rerata Waktu memutus (dalam hari)							
No.	Jenis	1- 25	>25							
1.	Perkara Gugatan	10	5	-	-	-	-	-	-	-
2.	Perkara Permohonan	16	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

No.	JENIS PERKARA	SISA 2018	MASUK 2019	BEBAN	PUTUS 2019	CABUT 2019	SISA 2019
1.	Sah atau	-	3	3	3	-	-
	tidaknya						
	penangkapan						
2.	Sah atau	-	1	1	1	-	-
	tidaknya						
	penahanan						
3.	Sah atau	-	-	-	-	-	-
	tidaknya						
	penghentian						
	penyidikan						
4.	Sah atau	-	-	-	-	-	-
	tidaknya						
	penghentian						
	penuntutan						
5.	Ganti kerugian	-	-	-	-	-	-
	dan rehabilitasi						
6.	Ganti kerugian	-	-	-	-	-	-
7.	Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-
8.	Sah atau	-	2	2	2	-	-
	tidaknya						
	penetapan						
	tersangka						
9.	Sah atau	-	-	-	-	-	-
	tidaknya						
	penyitaan						
10.	Sah atau	-	-	-	-	-	-
	tidaknya						
	penggeledahan						
11.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	6	6	6	-	-

12. Rekapitulasi Data Uang Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih

No.	Wilayah Pengadilan Negeri	Perkara Lalu Lintas	Denda	Ket.
1.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	759	271.388.000	-

13. Rekapitulasi Data Uang Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

No.	Jenis	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019
1.	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
2.	Narkotika	-	-	1	-
3.	Perlindungan Anak	-	-	-	-
4.	Perikanan			ı	-
5.	Kehutanan	-	-	-	-
6.	Lingkungan	-	-	-	-
7.	Pencucian Uang	-	-	-	-
	DLL	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-

14. Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

		Jumlah	Status Keberhasilan Mediasi				
	. Wilayah Pengadilan Negeri	Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan		
1	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	38	-	36	2		

15. Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahun 2019

	Wilayah	Jumlah	Jumlah	Status Keberhasilan				
No.	Pengadilan Negeri	Perkara Pidana Anak	Perkara Diversi	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses		
1.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	33	10	7	3	-		
	Jumlah	37	17	16	1	-		

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II



Jalan Negara No. 100 Gunung Sugih Telp. (0725) 529858-529859 Fax. (0725) 529859.

 $\textbf{Website}: \underline{www.pn-gunungsugih.go.id} \textbf{Email}: \underline{gunungsugihpn@gmail.com}$

Gunung Sugih - Kab. Lampung Tengah

LAPORAN DELEGASI MASUK Dan DELEGASI KELUAR

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TAHUN 2019

1. Delegasi Keluar :

Uraian	Jumlah
Delegasi keluar yang telah dikirimkan melalui SIPP	98
Delegasi keluar yang telah dilaksanakanmelalui SIPP	55
Delegasi keluar yang belum dilaksanakanmelalui SIPP	43
Total Delegasi Keluar	98

Catatan: Pada pelaksanaan delegasi keluar tersebut, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan delegasi keluar dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut belum dilaksanakan melalui SIPP, namun secara faktual,

keseluruhan permohonan delegasi keluar tersebut telah dilaksanakan dan di terima di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, maka dengan demikian Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

tertanggal 9 Februari 2016 dengan Nomor : 253/DJU/HM02.3/3/2016 Perihal Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP tersebut Penting Untuk Dilaksanakan.

NO URUT	No SIPP	Pengadilan Negeri Tujuan	Nomor Perkara	Tanggal Resi Kirim	Nomor Surat Pengantar	Jenis Delegasi	JS/JSP Ditunjuk	Lama Proses	Status
1	141	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.Bth/2018/PN Gns	2 Januari 2019	W9 U7	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Belum Ditunjuk	393	Sudah terkirim
2	142	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	33/Pdt.G/2018/PN Gns	10 Januari 2019	W9-U7/163/Hk.02/1/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	385	Sudah terkirim
3	143	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1/Pdt.P/2019/PN Gns	11 Januari 2019	W9.U7/ 166/HK.02/l/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	384	Sudah terkirim
4	144	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	21/Pdt.G/2018/PN Gns	16 Januari 2019	W9	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Belum Ditunjuk	379	Sudah terkirim
5	145	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.Bth/2018/PN Gns	17 Januari 2019	W9 U7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Belum Ditunjuk	378	Sudah terkirim
6	146	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	33/Pdt.G/2018/PN Gns	24 Januari 2019	W9-U7 /241/ Hk.02 /1 /2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	371	Sudah terkirim
7	147	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	33/Pdt.G/2018/PN Gns	24 Januari 2019	W9-U7 /240/ Hk.02 /1 /2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	371	Sudah terkirim
8	148	PENGADILAN NEGERI BEKASI	5/Pdt.G/2019/PN Gns	8 Februari 2019	W9-U7/349/Hk.02/2/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	356	Sudah terkirim
9	149	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	11/Pdt.G/2019/PN Gns	5 Maret 2019	W9-U7/539/Hk.02/3/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	9	Sudah dilaksanakan
10	150	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	12/Pdt.G/2019/PN Gns	6 Maret 2019	W9-U7/571/Hk.02/III/2019	Panggilan Sidang	ARSAN	7	Sudah dilaksanakan
11	151	PENGADILAN NEGERI BEKASI	5/Pdt.G/2019/PN Gns	8 Maret 2019	W9-U7 /572/ Hk.02 /3 /2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	328	Sudah terkirim
12	152	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	9/Pdt.G/2019/PN Gns	11 Maret 2019	W9-U7/590/Hk.01/3/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	4	Sudah dilaksanakan
13	153	PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO	13/Pdt.G/2019/PN Gns	15 Maret 2019	W9-U7/627/Hk.02/3/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	321	Sudah terkirim
14	154	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	12/Pdt.G/2019/PN Gns	18 Maret 2019	W9-U7/643/HK.02./03/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	318	Sudah terkirim
15	155	PENGADILAN NEGERI	14/Pdt.G/2019/PN Gns	22 Maret 2019	W9-U7/676/Hk.02/3/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	315	Sudah terkirim

		TANJUNG KARANG							
16	156	PENGADILAN NEGERI BEKASI	5/Pdt.G/2019/PN Gns	4 April 2019	W9.U7/755/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	301	Sudah terkirim
17	157	PENGADILAN NEGERI METRO	20/Pdt.G/2016/PN Gns	5 April 2019	W9.U7/761/Hk.02/4/2019	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	Belum Ditunjuk	301	Sudah terkirim
18	158	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	20/Pdt.G/2016/PN Gns	5 April 2019	W9.U7/760/Hk.02/4/2019	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	MAT JUDAR, S.H.	6	Sudah dilaksanakan
19	159	PENGADILAN NEGERI METRO	19/Pdt.G/2016/PN Gns	12 April 2019	W9-U7/834/Hk.02/4/2019	Lain lain	Subowo	11	Sudah dilaksanakan
20	160	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	15/Pdt.G/2019/PN Gns	10 April 2019	W9-U7/801/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	295	Sudah terkirim
21	161	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	15/Pdt.G/2019/PN Gns	10 April 2019	W9-U7/800/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	Sumardi	5	Sudah dilaksanakan
22	162	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	10 April 2019	W9-U7/799/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	ANWAR HAMID.SH	5	Sudah dilaksanakan
23	163	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	10 April 2019	W9-U7/816/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	8	Sudah dilaksanakan
24	164	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	10 April 2019	W9-U7/798/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	12	Sudah dilaksanakan
25	165	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	19/Pdt.G/2016/PN Gns	12 April 2019	W9-U7/835/Hk.02/4/2019	Lain lain	MAT JUDAR, S.H.	4	Sudah dilaksanakan
26	166	PENGADILAN NEGERI METRO	19/Pdt.G/2016/PN Gns	12 April 2019	W9-U7/834/Hk.02/4/2019	Lain lain	Subowo	3	Sudah dilaksanakan
27	167	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	12/Pdt.G/2019/PN Gns	15 April 2019	W9-U7/852/HK.02/04/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	JIMI HENDERIYANTO, S.H.,M.H.	9	Sudah dilaksanakan
28	168	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	16 April 2019	W9-U7/854/HK.02/04/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	7	Sudah dilaksanakan
29	169	PENGADILAN NEGERI KALIANDA	15/Pdt.G/2019/PN Gns	2 Mei 2019	W9.U7/983/Hk.02/5/2019	Lain lain	ELPIYAN	7	Sudah dilaksanakan
30	170	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	2 Mei 2019	W9.U7/982/Hk.02/5/2019	Lain lain	ANWAR HAMID.SH	6	Sudah dilaksanakan
31	171	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	2 Mei 2019	W9.U7/981/Hk.02/5/2019	Lain lain	MAT JUDAR, S.H.	4	Sudah dilaksanakan
32	172	PENGADILAN NEGERI METRO	15/Pdt.G/2019/PN Gns	2 Mei 2019	W9.U7/980/Hk.02/5/2019	Lain lain	Subowo	4	Sudah dilaksanakan
33	173	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	18/Pdt.G/2019/PN Gns	15 Mei 2019	W9- U7/1075/HK.02/05/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	6	Sudah dilaksanakan
34	174	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	15 Mei 2019	W9.U7/1076/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	ANWAR HAMID.SH	7	Sudah dilaksanakan
35	175	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	11/Pdt.G/2019/PN Gns	17 Mei 2019	W9-U7/1100/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	258	Sudah terkirim
36	176	PENGADILAN NEGERI METRO	19/Pdt.G/2019/PN Gns	20 Mei 2019	W9-U7/1108/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	Dewa Noviandri, S.H.	1	Sudah dilaksanakan
37	177	PENGADILAN NEGERI KOTABUMI	15/Pdt.G/2019/PN Gns	22 Mei 2019	W9.U7/1125/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	Sumardi	1	Sudah dilaksanakan
38	178	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	18/Pdt.G/2019/PN Gns	29 Mei 2019	W9- U7/1168/HK.02/05/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	2	Sudah dilaksanakan
39	179	PENGADILAN NEGERI METRO	19/Pdt.G/2019/PN Gns	31 Mei 2019	W9-U7/1169/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	Subowo	11	Sudah dilaksanakan
40	180	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	11/Pdt.G/2019/PN Gns	31 Mei 2019	W9-U7/1170/Hk.02/5/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	244	Sudah terkirim
41	181	PENGADILAN NEGERI DEPOK	20/Pdt.G/2019/PN Gns	31 Mei 2019	W9-U7/1172/HK.02/5/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	244	Sudah terkirim
42	182	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	20/Pdt.G/2019/PN Gns	31 Mei 2019	W9-U7/1171/HK.02/5/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	244	Sudah terkirim
43	183	PENGADILAN NEGERI METRO	21/Pdt.G/2019/PN Gns	12 Juni 2019	W9-U7/1185/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	Suryanto	1	Sudah dilaksanakan
44	184	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	9/Pdt.G/2019/PN Gns	13 Juni 2019	W9-U7/1199/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	6	Sudah dilaksanakan
45	185	PENGADILAN NEGERI BEKASI	5/Pdt.G/2019/PN Gns	19 Juni 2019	W9.U7/1235/Hk.02/4/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	225	Sudah terkirim
46	186	PENGADILAN NEGERI METRO	19/Pdt.G/2019/PN Gns	20 Juni 2019	W9-U7/1236/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	224	Sudah terkirim
47	187	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	25/Pdt.G/2019/PN Gns	20 Juni 2019	W9-U7/1241/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	224	Sudah terkirim
48	188	PENGADILAN NEGERI METRO	21/Pdt.G/2019/PN Gns	26 Juni 2019	W9-U7/1264/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	Subowo	1	Sudah dilaksanakan
49	189	PENGADILAN NEGERI DEPOK	20/Pdt.G/2019/PN Gns	27 Juni 2019	W9-U7/1273/HK.02/6/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	217	Sudah terkirim
50	190	PENGADILAN	15/Pdt.G/2019/PN Gns	27 Juni 2019		••	Belum Ditunjuk	217	Sudah terkirim

		NEGERI TANJUNG KARANG				Sidang			
51	191	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	4 Juli 2019	W9 U7/1517/Hk.02/07/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Belum Ditunjuk	210	Sudah terkirim
52	192	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	3/Pid.Pra/2019/PN Gns	8 Juli 2019	W9-U7/1321/HK.01/7/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	206	Sudah terkirim
53	193	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	11 Juli 2019	W9.U7/1359/Hk.02/7/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	1	Sudah dilaksanakan
54	194	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	27/Pdt.G/2019/PN Gns	11 Juli 2019	W9.U7/1360/Hk.02/7/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	0	Sudah dilaksanakan
55	195	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	18 Juli 2019	W9.U7/1400/Hk.02/7/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	0	Sudah dilaksanakan
56	196	PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU	20/Pdt.G/2016/PN Gns	18 Juli 2019	W9-U7/1402/Hk.02/8/2018	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori PK	FERTA FIURA	6	Sudah dilaksanakan
57	197	PENGADILAN NEGERI METRO	21/Pdt.G/2019/PN Gns	19 Juli 2019	W9.U7/1406/Hk.02/7/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	Subowo	3	Sudah dilaksanakan
58	198	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	23 Juli 2019	W9- U7/1437/HK.02/07/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	MAT JUDAR, S.H.	9	Sudah dilaksanakan
59	199	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	23 Juli 2019	1437	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	MAT JUDAR, S.H.	9	Sudah dilaksanakan
60	200	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	23 Juli 2019	1436	Lain lain	MAT JUDAR, S.H.	9	Sudah dilaksanakan
61	201	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	30/Pdt.G/2019/PN Gns	25 Juli 2019	W9-U7/1142/HK.02/7/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	1	Sudah dilaksanakan
62	202	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	18/Pdt.G/2019/PN Gns	2 Agustus 2019	W9- U7/1487/HK.02/VIII/2019	Panggilan Sidang	MARYANI, SH.	4	Sudah dilaksanakan
63	203	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	5/Pid.Pra/2019/PN Gns	6 Agustus 2019	W6-U7/1513/HK.01/8/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	177	Sudah terkirim
64	204	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	5/Pid.Pra/2019/PN Gns	6 Agustus 2019	W9-U7/1513/Hk.01/8/2018	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	177	Sudah terkirim
65	205	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	5/Pid.Pra/2019/PN Gns	22 Agustus 2019	W9-U7/1628/Hk.01/8/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	161	Sudah terkirim
66	206	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	32/Pdt.G/2019/PN Gns	28 Agustus 2019	W9.U7/1660/Hk.02/8/2019	Panggilan Sidang	MOCHAMAD TAUFIK	9	Sudah dilaksanakan
67 68	207	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA PENGADILAN	33/Pdt.G/2019/PN Gns	30 Agustus 2019	W9-U7/1673/HK.02/8/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	153	Sudah terkirim
	208	NEGERI TANJUNG KARANG	33/Pdt.G/2019/PN Gns	30 Agustus 2019	W9-U7/1672/HK.02/8/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	4	Sudah dilaksanakan
69	209	PENGADILAN NEGERI BANDUNG	15/Pdt.G/2019/PN Gns	9 September 2019	W9.U7/1729/Hk.02/9/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	UDAN HAERUDIN	11	Sudah dilaksanakan
70	210	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	33/Pdt.G/2019/PN Gns	13 September 2019	W9-U7/1752/HK.02/9/2019	Panggilan Sidang	MARYANI, SH.	5	Sudah dilaksanakan
71	211	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	33/Pdt.G/2019/PN Gns	13 September 2019	W9-U7/1753/HK.02/9/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	6	Sudah dilaksanakan
72	212	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	17 September 2019	W9- U7/1829/HK.02/09/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	MAT JUDAR, S.H.	2	Sudah dilaksanakan
73	213	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	6/Pdt.G/2019/PN Gns	18 September 2019	W9- U7/1830/HK.02/09/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	MAT JUDAR, S.H.	1	Sudah dilaksanakan
74	214	PENGADILAN NEGERI METRO	6/Pid.Pra/2019/PN Gns	26 September 2019	W9-U7/1870/HK.01/9/2019	Panggilan Sidang	Suryanto	1	Sudah dilaksanakan
75 76	215	PENGADILAN NEGERI TANGERANG PENGADILAN	38/Pdt.G/2019/PN Gns	1 Oktober 2019	W9- U7/1886/HK.02/10/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	121	Sudah terkirim
70	216	NEGERI TANJUNG KARANG	40/Pdt.G/2019/PN Gns	9 Oktober 2019	W9- U7/1923/Hk.02/10/2019	Panggilan Sidang	MAT JUDAR, S.H.	5	Sudah dilaksanakan
77	217	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	11/Pdt.G/2019/PN Gns	15 Oktober 2019	W9- U7/1936/HK.02/10/2019	Pemberitahuan Pernyataan Banding	MAT JUDAR, S.H.	3	Sudah dilaksanakan
78	218	PENGADILAN NEGERI	38/Pdt.G/2019/PN Gns	17 Oktober 2019	W9- U7/1962/HK.02/10/2019	Panggilan Sidang	MULYADI	11	Sudah dilaksanakan

		TANGERANG							
79	219	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	11/Pdt.G/2019/PN Gns	25 Oktober 2019	W9- U7/1975/HK.02/10/2019	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	MAT JUDAR, S.H.	3	Sudah dilaksanakan
80	220	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	11/Pdt.G/2019/PN Gns	29 Oktober 2019	W9- U7/1977/HK.02/10/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	MAT JUDAR, S.H.	4	Sudah dilaksanakan
81	221	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	25/Pdt.G/2019/PN Gns	1 November 2019	W9.U7/2003/Hk.02/9/2019	Pemberitahuan Pernyataan Banding	MAT JUDAR, S.H.	5	Sudah dilaksanakan
82	222	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	11/Pdt.G/2019/PN Gns	7 November 2019	W9- U7/2018/HK.02/11/2019	Lain lain	Belum Ditunjuk	84	Sudah terkirim
83	223	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	44/Pdt.G/2019/PN Gns	8 November 2019	W9- U7/2027/HK.02/11/2019	Panggilan Sidang	SUGIARTO, S.AP.	5	Sudah dilaksanakan
84	224	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	11/Pdt.G/2019/PN Gns	11 November 2019	W9- U7/2028/HK.02/11/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Belum Ditunjuk	80	Sudah terkirim
85	225	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	25/Pdt.G/2019/PN Gns	12 November 2019	W9- U7/2034/HK.02/11/2019	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Belum Ditunjuk	80	Sudah terkirim
86	226	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	25/Pdt.G/2019/PN Gns	13 November 2019	W9.U7/2032/Hk.02/8/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Belum Ditunjuk	80	Sudah terkirim
87	227	PENGADILAN NEGERI METRO	25/Pdt.G/2019/PN Gns	13 November 2019	W9.U7/2032/Hk.02/8/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Ahyan Azis	3	Sudah dilaksanakan
88	228	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	38/Pdt.G/2019/PN Gns	19 November 2019	W9- U7/2065/HK.02/11/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	72	Sudah terkirim
89	229	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	44/Pdt.G/2019/PN Gns	25 November 2019	W9- U7/2078/HK.02/11/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	66	Sudah terkirim
90	230	PENGADILAN NEGERI METRO	25/Pdt.G/2019/PN Gns	27 November 2019	W9.U7/2080/Hk.02/11/2019	Lain lain	Belum Ditunjuk	66	Sudah terkirim
91	231	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	11/Pdt.G/2019/PN Gns	3 Desember 2019	W9- U7/2097/HK.02/12/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	Belum Ditunjuk	58	Sudah terkirim
92	232	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	11/Pdt.G/2019/PN Gns	3 Desember 2019	W9- U7/2098/HK.02/12/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	Belum Ditunjuk	58	Sudah terkirim
93	233	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	40/Pdt.G/2019/PN Gns	9 Desember 2019	W9- U7/2111/Hk.02/12/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	52	Sudah terkirim
94	234	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	40/Pdt.G/2019/PN Gns	9 Desember 2019	W9- U7/2112/Hk.02/12/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	52	Sudah terkirim
95	235	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	38/Pdt.G/2019/PN Gns	11 Desember 2019	W9- U7/2117/HK.02/12/2019	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	50	Sudah terkirim
96	236	PENGADILAN NEGERI METRO	23/Pdt.G/2019/PN Gns	20 Desember 2019	W9- U7/2133/HK.02/12/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	TARIKA ANGGI PRAMONO	6	Sudah dilaksanakan
97	237	PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG	25/Pdt.G/2019/PN Gns	23 Desember 2019	W9- U7/2137/HK.02/12/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	MAT JUDAR, S.H.	3	Sudah dilaksanakan
98	238	PENGADILAN NEGERI METRO	25/Pdt.G/2019/PN Gns	23 Desember 2019	W9- U7/2137/HK.02/12/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	TARIKA ANGGI PRAMONO	3	Sudah dilaksanakan

2. Delegasi Masuk:

Uraian	Jumlah
Delegasi masuk yang telah diterima melalui SIPP	71
Delegasi masuk yang telah dilaksanakan oleh PN Gunung Sugih melalui SIPP	71
Delegasi masuk yang belum dilaksanakan oleh PN Gunung Sugih melalui SIPP	0
Total Delegasi Masuk	71

Catatan : Pada pelaksanaan delegasi masuk tersebut, keseluruhan telah dilaksanakan dan di dikirimkan kembali ke masing-masing pengadilan pemohon delegasi baik secara faktual maupun melalui Aplikasi SIPP.

No	Pengadilan Negeri Tujuan	Nomor Perkara	Tanggal Resi Kirim	Nomor Surat Pengantar	Jenis Delegasi	JS/JSP Ditunjuk	Lama Proses	Status
1	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	21/Pdt.G/2016/PN Btl.	-	W13.U5/1401/HK.02/VI/2016	Panggilan Sidang	DUHITA FITRIANI	1308	Sudah terkirim
2	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	21/Pdt.G/2016/PN Btl.	-	W13.U5/900/HK.02/III/2017	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	RANTI FEBRIANTI, SH	1039	Sudah terkirim
3	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	21/Pdt.G/2016/PN Btl.	-	W13.U5/886/HK.02/III/2017	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	RANTI FEBRIANTI, SH	1043	Sudah terkirim
4	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	21/Pdt.G/2016/PN Btl.	-	W13.U5/886/HK.02/III/2017	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	RANTI FEBRIANTI, SH	1043	Sudah terkirim
5	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN PN.Kbu	4 Februari 2016	W9-U3/114/HK.02/II/2016	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	1456	Sudah terkirim

6	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN Met	25 Mei 2016	W9.U2/534/HK.02/V/2016	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI	1346	Sudah terkirim
7	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN Met	17 Juni 2016	W9.U2/698/HK.02/VI/2016	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI	1322	Sudah terkirim
8	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN Met	19 Juli 2016	W9.U2/699/HK.02/VII/2016	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI	1290	Sudah terkirim
9	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN Met	19 Juli 2016	W9.U2/699/HK.02/VII/2016	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI	1290	Sudah terkirim
10	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/PDT.G/2016/PN Kbu	4 Agustus 2016	W9-U3/585/HK.02/VIII/2016	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	6	Sudah terkirim
11	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/PDT.G/2016/PN Kbu	4 Agustus 2016	W9-U3/5845/HK.02/VIII/2016	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	6	Sudah terkirim
12	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.G/2016/PN Met	9 Agustus 2016	W9.U2/824/HK.02/VIII/2016	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	DWI MARYUDI	1269	Sudah terkirim
13	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/PDT.G/2016/PN Kbu	13 September 2016	W9-U3/734/HK.02/IX/2016	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	1	Sudah terkirim
14	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/PDT.G/2016/PN Kbu	13 September 2016	W9-U3/735/HK.02/IX/2016	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	1	Sudah terkirim
15	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	12/PDT.G/2016/PN Kbu	27 September 2016	W9-U3/799/HK.02/IX/2016	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI	1220	Sudah terkirim
16	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	11/Pdt.G/2017/PN Bbu	9 Februari 2018	W9-U9/132/HK.02/II/2018	Pemberitahuan Pernyataan Banding	RUDI PRATAMA	6	Sudah terkirim
17	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	27 Maret 2018	W9.U1/1017/HK.02/III/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	8	Sudah terkirim
18	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	27 Maret 2018	W9.U1/1016/HK.02/III/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	8	Sudah terkirim
19	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	9/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	5 April 2018	W9.U1/1107/HK.03/IV/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	5	Sudah terkirim
20	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	9/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	5 April 2018	W9.U1/1104/HK.03/IV/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	5	Sudah terkirim
21	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	9/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	26 April 2018	W9.U1/1363/HK.02/IV/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	6	Sudah terkirim
22	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/Pdt.G/2018/PN Wat	16 Mei 2018	W13-U3/1155/HK.02/V/2018	Lain lain	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	624	Sudah terkirim
23	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	19/Pdt.G/2018/PN Njk	22 Mei 2018	W14.U27/479/HK.02/5/2018	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	619	Sudah terkirim
24	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/Pdt.G/2018/PN Wat	7 Juni 2018	W13-U3/1312/HK.02/VI/2018		M. LIKHANI BALAW, S.Sos	602	Sudah terkirim
25	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	244/Pdt.G/2017/PN Skt	11 Juli 2018	w12.u2/212/pdt.04.01/7/2018	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	RUDI PRATAMA	9	Sudah terkirim
26	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	244/Pdt.G/2017/PN Skt	18 Juli 2018	w12.u2/305/pdt.04.01/7/2018	Pemberitahuan Pernyataan Banding	RUDI PRATAMA	9	Sudah terkirim
27	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	19/Pdt.G/2018/PN Njk		W14.U27/611/HK.02/7/2018	Panggilan Sidang		556	Sudah terkirim
28	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	4/Pdt.G/2019/PN Mgl	25 Januari 2019	W9.U6/219/HK.02/I/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
29	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	8/PDT.G/2014/PN Bbu	25 Februari 2019	W9-U9/226/HK.02/II/2019	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (PK)	RUDI PRATAMA	2	Sudah terkirim
30	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	5/Pdt.G/2019/PN Bbu	13 Maret 2019	W9-U9/292/HK.02/III/2019	Panggilan Sidang	DWI MARYUDI, SH	1	Sudah terkirim
31	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	4/Pdt.G/2019/PN Mgl	22 Maret 2019	W.U6/520/HK.02/III/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	316	Sudah terkirim
32	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	11/Pdt.G/2017/PN Bbu	25 Maret 2019	W9-U9/316/HK.02/III/2019	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	RUDI PRATAMA	1	Sudah terkirim
33	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	51/Pdt.G/2019/PN Plg	1 April 2019	W6.U1/1347/HK.02/IV/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	10	Sudah terkirim
34	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	9/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	5 April 2019	W9.u1/2027/hk.02/iv/2019	Lain lain	RUDI PRATAMA	3	Sudah terkirim
35	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	9/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	5 April 2019	W9.u1/2026/hk.02/iv/2019	Lain lain	RUDI PRATAMA	3	Sudah terkirim
36	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	51/Pdt.G/2019/PN Plg	11 April 2019	W6.U1/1711/HK.02/IV/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	1	Sudah terkirim
37	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	51/Pdt.G/2019/PN Plg	29 April 2019	W6.U4/1922/HK.02/IV/2019	Panggilan Sidang Pemberitahuan dan	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	3	Sudah terkirim
38	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	25/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	14 Mei 2019	W9.U1/2624/KH.02/V/2019	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	RUDI PRATAMA	1	Sudah terkirim
39	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	25/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	14 Mei 2019	W9.U1/2625/KH.02/V/2019	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	RUDI PRATAMA	2	Sudah terkirim
40	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	7/Pdt.G/2018/PN Mgl	24 Mei 2019	W9.U6/753/HK.02/V/2019	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	248	Sudah terkirim
41	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	7/Pdt.G/2018/PN Mgl	24 Mei 2019	W9.U6/751/HK.02/V/2019	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	17	Sudah terkirim
42	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	22/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	27 Juni 2019	W9.u1/3906/hk.03/vi/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	1	Sudah terkirim
43	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	14/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	18 Juli 2019	W9.U1/5314/phi.02/VII/2019	Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama	RUDI PRATAMA	1	Sudah terkirim
44	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	30/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	25 Juli 2019	W9.U1/5659/HK.02/VII/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	12	Sudah terkirim
45	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	30/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	25 Juli 2019	W9.U1/5658/HK.02/VII/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	12	Sudah terkirim
46	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	143/Pdt.G/2019/PN Plg	30 Juli 2019	W6.U1/3350/HK.02/VII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
47	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	143/Pdt.G/2019/PN Plg	30 Juli 2019	W6.U1/3351/HK.02/VII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
48	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	143/Pdt.G/2019/PN Plg	30 Juli 2019	W6.U1/3348/HK.02/VII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
49	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	143/Pdt.G/2019/PN Plg	30 Juli 2019	W6.U1/3421/HK.02/VIII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
50	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	143/Pdt.G/2019/PN Plg	30 Juli 2019	W6.U1/3422/HK.02/VIII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	7	Sudah terkirim
51	PENGADILAN NEGERI	143/Pdt.G/2019/PN Plo	a 30 Juli 2019) W6.U1/3424/HK.02/VIII/20 ²	19 Panggilan Sidang	M. LIKHANI	7	Sudah
	GUNUNG SUGIH PENGADILAN NEGERI	5/Pdt.G/2019/PN Bbu	13 Agustus			BALAW, S.Sos RUDI PRATAMA	2	terkirim Sudah
53	GUNUNG SUGIH PENGADILAN NEGERI	20/Pdt.G/2019/PN Mgl	2019 30 Agustus			M. LIKHANI	9	Sudah
	GUNUNG SUGIH	-: -: -: :	2019		55 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BALAW, S.Sos	-	terkirim

54	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	36/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	3 September 2019	W9.U1/6678/Hk.02/IX/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	1	Sudah terkirim
55	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	5/Pdt.P-Kons/2019/PN Sdn	12 September 2019	W9.U8/968/HK.02/IX/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	0	Sudah terkirim
56	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	5/Pdt.P-Kons/2019/PN Sdn	12 September 2019	W9.U8/1012/HK.02/IX/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	0	Sudah terkirim
57	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	3/Pdt.P-Kons/2019/PN Sdn	12 September 2019	W9.U8/1016/HK.02/IX/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	6	Sudah terkirim
58	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	23/Pdt.G/2019/PN Snt	19 September 2019	W5-U7/2439/HK.02/IX/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	13	Sudah terkirim
59	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	4/Pdt.G/2019/PN Mgl	27 September 2019	W9.U6/1274/HK.02/IX/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	126	Sudah terkirim
60	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	20/Pdt.G/2019/PN Mgl	4 Oktober 2019	W9.U6/2300/HK.02/X/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	19	Sudah terkirim
61	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	23/Pdt.G/2019/PN Snt	21 Oktober 2019	W5-U7/2733/HK.02/X/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	2	Sudah terkirim
62	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	227/Pdt.G/2019/PN Plg	6 November 2019	W6.U1/4891/HK.02/XI/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	12	Sudah terkirim
63	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	65/Pdt.G/2018/PN Mgl	12 November 2019	W9.U6/1495/HK.02/XI/2019	Pemberitahuan Pernyataan Banding	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	4	Sudah terkirim
64	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	17/Pdt.Sus- PHI/2018/PN Tjk	28 November 2019	W9.u1/8826/hk.02/xi/2019	Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	RUDI PRATAMA	6	Sudah terkirim
65	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	227/Pdt.G/2019/PN Plg	5 Desember 2019	W6.U1/5372/HK.02/XII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	13	Sudah terkirim
66	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	37/Pdt.G/2019/PN Snt	11 Desember 2019	W5-U7/3136/HK.02/XII/2019	Panggilan Sidang	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	8	Sudah terkirim
67	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	16/Pdt.G/2019/PN Met	11 Desember 2019	W9-U2/2/HK.02/XII/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	2	Sudah terkirim
68	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	22/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	17 Desember 2019	W9.u1/9669/hk.03/xii/2019	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	RUDI PRATAMA	3	Sudah terkirim
69	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	22/Pdt.Sus- PHI/2019/PN Tjk	17 Desember 2019	W9.u1/9670/hk.03/xii/2019	Lain lain	RUDI PRATAMA	3	Sudah terkirim
70	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	16/Pdt.G/2019/PN Met	23 Desember 2019	W9.U2/2310/HK.02/XII/2019	Panggilan Sidang	RUDI PRATAMA	8	Sudah terkirim
71	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH	4/Pdt.G/2019/PN Mgl	26 Desember 2019	W9.U6/1721/HK.02/XII/2019	Lain lain	M. LIKHANI BALAW, S.Sos	12	Sudah terkirim

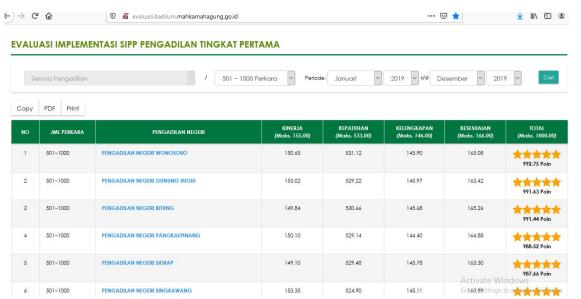
BAB III KINERJA EVALUASI SIPP

Merujuk Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No 1153/DJU/HM.02.3/12/2018 Hal Penerapan Register Eletronik pada Pengadilan, Evaluasi penyelesaian perkara dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019 telah diumumkan oleh Direktorat Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI melalui surat Dirjen Badilum MA. RI. DR. Prim Haryadi, SH.MH pada hari Selasa , Tanggal 7 Januari 2020 sebagaimana tayang dalam laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

lo	Jml Perkara	PengadilanNegeri	Kinerja	Kepatuhan	Kelangkapan	Kesesuaian	Total
			(Maks.155.00)	(Maks.533.00)	(Maks.146.00)	(Maks.166.00)	(Maks.1000.00)
3	2	3	4			,	
1	1~500	Pengadilan Negeri Semarapura	.152.26	.531.34	145.62	.164.01	.993.23 poin
2	501~1000	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	.153.02	.528.71	.146.00	.164.28	.992.01 poin
3	501~1000	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	149.98	.531.56	.145.53	.164.58	.991.65 Poin

Hasil Evalusi terhadap 382 Pengadilan Negeri (PN) seluruh Indonesia tersebut membagi klasifikasi perankingan dalam beberapa kelas, silakan baca pada link tersebut. Bila urutan dengan jumlah poin tertinggi secara nasional disusun secara bebas tanpa melihat kategori kelas maka PN Semarapura berada diurutan pertama dengan nilai 993.23 poin. Kemudian disusul urutan kedua diraih PN Gunung Sugih kelas II dengan dengan nilai 992.01 poin dan urutan ketiga diduduki oleh PΝ **Pangkalpinang** yang meraih nilai 991.65 poin. Dalam pengumuman evaluasi SIPP terhadap 382 pengadikan negeri selndonesia itu juga ditayangkan poin-poin terendah yang diraih oleh beberapa pengadilan negeri.

Tugas Utama (Core Buissnes) Pengadilan dimanapun keberadaannya di planet ini adalah penyelesaian perkara. Menyelesaikan perkara artinya menerima, memeriksa dan memutus berkas perkara.



Jika mengukur keadilan dalam kaitan subtansi berat ringan hukuman atau benar tidaknya suatu perbuatan dalam penentuan hak maka ukurannya bisa relatif. Buat terdakwa hukuman ringan dianggap sudah adil tapi bagi korban bisa saja putusan itu dinilai kurang adil. Bagi Penggugat sudah sangat adil karena hakim menerima gugatan tapi bagi tergugat menilai putusan hakim ngawur karena tidak mempertimbangkan fakta dan bukti dari versinya secara maksimal.

Bisa anda bayangkan jika petugas penilai Zona Integritas (ZI) dari KemenpanRI datang melakukan survey kepada korban yang mana pengadilan menghukum terdakwa ringan atau Petugas BPS yang diperbantukan oleh KemenpanRB melakukan survey kepuasan pelanggan, datang kepada tergugat yang dikalahkan oleh pengadilan untuk mengambil sampel kepuasan. Maka bisa dipastikan pengadilan tersebut mendapat nilai ambyar. Karena data yang masuk kepada surveyor adalah ketidakpuasan. Jadi jika ukuran adil adalah usaha pengadilan memuaskan semua pihak maka sia-sia usaha itu karena mustahil semua pihak dipuaskan hasrat keadilannya. (Penting buat para penilai ZI dari instansi KemenpanRB itu untuk diberitahu cara pengadilan bekerja. Sehingga tidak disamakan seperti instansi Kantor Samsat yang mengurusi pelayanan publik pembuatan SIM dan Kantor Catatan Sipil dalam Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP). Mengukur kepuasan pelayanan pengadilan adalah menilai bagaimana cara aparatur pengadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara. Dalam pelayanan core buisness pengadilan itu tidak ditolerir pengadilan menerima hal-hal yang koruptif. Hal itu sudah disepakati dan ditaati oleh seluruh aparat pengadilan di Indonesia. Jika ada satu dua praktik koruptif ditemukan di satu pengadilan tentu jangan cepat menyimpulkan hal tersebut berlaku disemua pengadilan. Karena sistem yang bagun oleh Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya mencegah praktik koruptif. Ini bukan argumen, ini adalah pembelaan.

Mengukur kepuasan pelayanan di Pengadilan adalah menilai kinerja profesionalisme aparat pengadilan yakni Ketua, Wakil Ketua pengadilan, hakim, Panitera, Panitera Pengganti (PP), Juru Sita, Juru sita Pengganti dan jajaran aparat kesekretariatan pengadilan didalamnya.

Mahkamah Agung sudah sejak Tahun 2012 lalu menerapkan aplikasi canggih terkait data informasi penanganan perkara. Saat itu masih bernama Case Track System (CTS) sebelum kemudian pada tahun-tahun berikutnya dilakukan penyempurnaan dan kini akrab dikenal dengan aplikasi Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Inilah mahakarya Mahkamah Agung diera teknologi digital berbasis data informasi. Mahakarya ini lahir dan dibesarkan di Zaman Ketua Mahkamah Agung Prof Dr. H.Mohamad Hatta Ali, SH.MH. Revolusi pengadilan menuju teknologi modern berbasis IT kongkritnya dimulai dari sini. Setelah rilis SIPP kemudian MA menelurkan e-Court yg didalamnya terdapat e-Litigasi. Aplikasi e-Court disupport oleh basis data teknologi SIPP. Melalui SIPP juga lahir e-delegasi serta aplikasi MIS SIPP. Semua terhubung dalam satu data besar perkara dalam aplikasi SIPP.

SIPP yang selalu update dengan teknologi koneksi internet ini dibuat untuk mengukur dan mengatur profesionalisme aparatur pengadilan dalam menginput data perkara, proses persidangan, putusan bahkan sampai informasi data suatu perkara dalam proses upaya hukum hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Informasi dalam SIPP dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mengetahui proses persidangan suatu perkara.

Pimpinan Mahakamah Agung dan Pimpinan Pengadilan Tinggi hanya dengan menjentikan jarinya dapat memantau dan melucuti apakah jajaran aparat suatu pengadilan dibawahnya sudah atau belum melaksanakan tugas core buisnessnya dengan maksimal. Sesungguhnya dalam SIPP itu akan terefleksi nilai akuntabilitas Kinerja, kedisiplinan pegawai, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik yang sering dipakai dalam penilaian ZI itu.

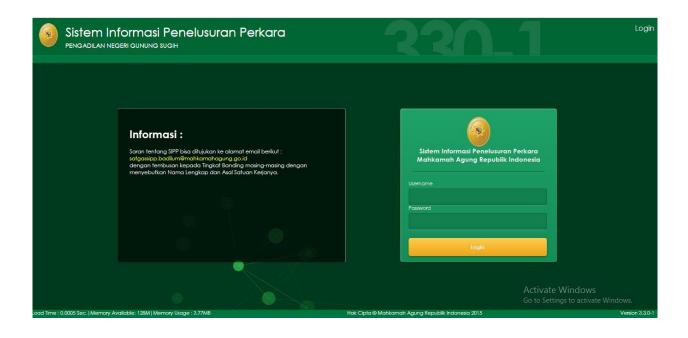
Aplikasi SIPP milik Mahkamah Agung ini tidak dimiliki oleh lembaga hukum lain di negeri ini. Mohon maaf bukan saya berlebihan mengklaim, sampai saat ini Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki aplikasi modern sejenis untuk menyatukan data detil kinerja terkini jajarannya dibawahnya.

Hebatnya aplikasi ini seluruhnya dimiliki dan diterapkan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia termasuk diterapkan di 382 pengadilan negeri seluruh Indonesia. Canggihnya aplikasi ini bukan saja mampu melucuti ketidakbecusan tapi juga sekaligus memproyeksikan kehebatan aparatur pengadilan dalam bekerja menyelesaikan perkara.

Maka bila ada pihak dari pemerintah misalnya KemenpanRB bertanya adakah peradilan memiliki aplikasi berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung? Tidak usah cari yang lain, inilah jawabannya aplikasi SIPP adalah mahakarya agung teknologi aplikatif milik MA dan jajaran dibawahnya.

CARA KERJA SIPP

SIPP memetakan ukuran profesionalisme itu dalam peniaian 4 elemen yaitu Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan dan Kesesuaian.



Elemen pertama adalah kinerja. Kinerja adalah seberapa banyak perkara yang masuk pada suatu pengadilan dalam setahun dan seberapa banyak perkara yang masuk tersebut diputus hakim dalam satu tahun itu (jumlah rasio penangan perkara). Bayangkan suatu pengadilan menerima 1000 perkara dalam satu tahun maka 1000 perkara itu harus diupayakan dengan serius di putus pada tahun tersebut dan detil aktivitas penyelesaian perkara ini akan terekam dalam SIPP. Perlu dicatat jika pengadilan negeri setahun itu menerima 1000 perkara maka harus pula singkron dengan penyerapan anggaran 01 Mahkamah Agung dan anggaran 03 Direktorat Badan Peradilan Umum yang sudah disediakan untuk itu. Habiskan uangnya! jika tidak becus menghabiskan uang dengan pertanggungjawaban sesuai dengan kinerja penyelesaian perkara maka pengadilan itu tidak profesional. Menghabiskan uang yang telah disediakan saja tidak mampu.

Lalu elemen kedua adalah Kepatuhan. Pengertian Kepatuhan adalah terkait kedisiplinan aparat hakim dan panitera pengganti dalam menginput setiap tahapan dan detil penerimaan, pemeriksaan persidangan termasuk penundaan waktu persidangan hingga putusan. Jika satu orang hakim dan satu orang Panitera Pengganti (PP) sehari menyidangkan perkara 10 berkas maka 10 berkas perkara itu harus diperiksa dan diinput data persidangan dan penundaannya. Hakim dan PP dipersidangan harus konsentrasi membuktikan perkara lalu data keterangan saksi dicatat. Jika saksi 3 orang maka saksi itu didengar, ditanya dan dicatat keterangannya. Usai sidang PP pada hari itu juga harus patuh dalam input Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 23

SIPP pada kolom nama saksi-saksi, kolom edoc Berita Acara Sidang, kolom penundaan hari sidang. Ini baru 1 perkara jika 10 perkara maka 10 kali PP mengulang penginputan dengan data perkara yang berbeda dalam sehari. Jika salah atau terlambat input maka akan berkurang poin penilaian kepatuhan. Pada elemen Kepatuhan ini masih banyak detil pengisian lainnya seperti penginputan permohonan banding, kasasi, PK dan berikut ketepatan waktu pengiriman berkasnya.

Adapun pengertian elemen ketiga yakni kelengkapan dalah terkait dengan penginputan datadata dokumen persidangan yang dapat dilihat dan diakses oleh para pihak dan umum pada suatu
perkara berjalan. Jika hari itu perkara pada tahap putusan maka pada yang hari itu juga dokumen
putusan sudah siap dibacakan dan langsung diiput dalam aplikasi SIPP sehingga data putusan tersebut
keesokan harinya sudah bisa dibaca oleh khalayak umum. Jika sampai tahapan persidangan putusan
maka PP harus menginput dokumen putusan bersamaan dengan dokumen berita acara persidangan. PP
tersebut kebetulan pula bersidang 10 perkara hari itu sehingga harus menginput 10 berita acara
persidangan. Masih banyak terlihat pada kantor pengadilan negeri dengan beban jumlah perkara banyak
pada waktu jam kerja telah habis tetapi masih terlihat keriuhan PP yang sibuk berpindah tempat sidang
mengikuti majelis hakim bersidang diruang sidang lain. Sungguh melelahkan. Gaess berat jadi PP itu, dan
besar tanggungjawab hakim itu. Menambah beban pekerjaan mereka diluar tanggungjawab kerja
yudisialnya kadang saya tidak tega (tapi sudahlah gaji mereka kan sudah besar, demikian kawan
berbisik). Oya, dalam penilaian elemen kelengkapan ini masih ada lagi detil penginputan yang harus
cermati semisal data diversi, data lapor mediasi dan nilai sengketa.

Sedangkan elemen keempat adalah kesesuaian yakni terkait dengan sinkronisasi waktu antara Kepatuhan penginputan dan Kelengkapan data yang telah diinput. PP menginput jadwal sidang tuntutan misalnya pada hari senin akan tetapi dokumen surat tuntutan baru diinputnya pada hari selasa maka poin penilaian kinerjanya otomatis tidak sesuai. Data tanggal putusan dan tanggal sidang terakhir harus singkron. Jika tidak singkron otomatis sistem dalam SIPP akan mengurangi nilai kesesuaian kinerja pengadilan tersebut. Hebat bukan aplikasi SIPP ini.

Semua data statistik angka, jumlah, tahapan, nama terdakwa, nama hakim, nama panitera pengganti, nama ketua pengadilan, kasus posisi, jam, menit perdetik, detil proses hingga manifest evidence semua tergambar dalam SIPP. Jika Ketua Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ingin memantau berapa lama penyelesaian suatu perkara pidana atau perdata di suatu pengadilan negeri dalam sekejap tersaji data SIPP di depan mata. Memantau masa penahanan bagi terdakwa yang akan habis, soal ketepatan juru sita dalam memanggil para pihak, kapan terdakwa mulai diperiksa di ruang persidangan, bagaimana kepatuhan pelaksanaan panggilan delegasi, berapa lama jaksa penuntut umum mengahadirkan saksi, barang bukti hingga isi keterangan saksi serta jenis barang bukti dipersidangan semua tergambar dalam SIPP. Pimpinan Mahkamah Agung sampai masyarakat pencari keadilan juga bisa mengetahui kapan penundaan hari sidang, apa alasan tergugat tidak hadir, kapan hari Jaksa menuntut dan kapan waktunya hakim memutus. Bahkan setelah berkas perkara diputus hakim dan panitera pengganti serta ketua pengadilannya masih memikirkan proses administrasi perkara jika terdakwa terdakwa Banding, kasasi atau PK dalam detil ukuran waktu. Ini baru sebagian kecil saja dari detil-detil administratif dalam penyelesaian perkara di SIPP. Masih banyak detil-detil lainnya.



Sampai disini anda bisa mafhum jika kerja hakim dan PP itu dalam penyelesaian perkara sungguh berat dan ini jauh lebih berat ketimbang petugas Samsat yang menerbitkan SIM dan petugas Catatan Sipil yang memberi pelayanan publik pembuatan KTP. Basis pelayanan di Pengadilan itu berbeda dengan dengan 2 kantor pelayanan itu. Jika Pengadilan melayani pembuatan surat keterangan maka jenis pelayanan ini hanya pelayanan kecil saja dan itupun sudah dilayani pula dengan teknologi aplikasi "e-Raterang" banyarnya cukup Rp. 10.000,- saja.

Aplikasi SIPP sampai dengan versi terkini 3.3.0-1 ini sudah tidak lagi bisa diakali. Mengakalinya dalam pikiran saja saya tidak sanggup apalagi mengakalinya secara praktis data-data didalamnya. Mengatakan bahwa data-data dalam SIPP tidak valid sama saja mengatakan bahwa mahakarya canggih dari Mahkamah Agung tersebut tidak berguna. Berani

EVALUASI & APRESIASI

Evaluasi kinerja aparat pengadilan yang tergambar dalam SIPP itu berkaitan dengan disiplin pengelolaan administratif perkara adalah sangat penting. Disiplin administrasi penyelesaian perkara dipersidangan perkara adalah cermin kedisiplinan aparatur didalamnya. Kedisiplinan dalam penginputan data adalah cermin profesionalisme aparat yang pada akhirnya akan bermuara pada penggalian kebenaran dan keadilan. SIPP tidak mentolelir praktik maladministrasi. Seluruh Pengadilan Negeri kini sudah terakreditasi dalam program Ditjen Badilum lalu Akreditasi Penjaminan Mutu. Yang mana pengadikan negeri memiliki banyak sekali manifest Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hebatnya didalam SIPP semua SOP itu terejawantah.

Apa artinya 3 besar dari masing-masing PN yang berhasil mencapai poin SIPP tertinggi dari masing-masing level kategori jumlah perkara tersebut? Artinya PN tersebut adalah PN-PN yang telah bekerja keras berhasil melaksanakan tugas utamanya yakni menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan sangat baik dan profesional.

Saya mengucapkan salute dan selamat kepada PN –PN peraih Ranking tertinggi dikelasnya. Buat PN-PN peraih nilai lebih dari 990 poin ini menunjukan bahwa perkara di PN-PN tersebut hanya tersisa belasan saja di tahun 2019. Ini juga menunjukan di PN-PN tersebut ratusan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus meraih nilai kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian yang nyaris sempurna. Itu pasti karena kinerja Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Jajaran Hakim, Kepaniteraan, Kejurusitaan dan kesekretariatan PN-PN tersebut sangat baik.

Membaca daftar hasil evaluasi implementasi pada pengadilan tingkat pertama tahun 2019 pada Surat Dirjen Badilum di Laman Direktorat Badan Peradilan Umum MA RI itu juga dapat terlihat Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 25 bagaimana kinerja profesionalisme 382 PN-PN se-Indonesia terutama nilai PN-PN besar di kota besar yang masih dibawah standar bahkan jauh dibawah poin 900 yang merupakan ukuran standar poin bintang lima sebagai tanda kinerja yang maksimal.

Dari Rilis Poin SIPP Direktorat Badilum MA. RI itu menunjukan memang bukan hal mudah untuk menyelesaikan perkara dengan ukuran kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan Kesesuaian yang tinggi. Terlihat poin-poin SIPP di beberapa pengadilan kota besar seperti Jakarta, Medan, Makassar berada dalam poin yang rendah. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Dibutuhkan kemampuan mendistribusikan jumlah perkara pada jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang ada. Dibutuhkan kepemimpinan untuk meyakinkan timnya agar tumbuh kesungguhan aparat hakim dan PP didalamnya. Perlu adanya upaya pemahaman terus menerus tentang pentingnya penyelesaian perkara dengan penginputan data di SIPP secara disiplin. Jika alasan jumlah perkara sebagai hambatan maka penambahan jumlah hakim dan jumlah PP di pengadilan kota-kota besar itu adalah keniscayaan. Maka sudah sepantasnya memutasi para hakim-hakim dan PP-PP hebat yang saat ini berada di pengadilan daerah yang memiliki poin tertinggi dalam SIPP adalah suatu kepantasan.

Untuk Pengadilan-Pengadilan dengan poin SIPP rendah jangan bekecil hati masih ada kesempatan tahun 2020 untuk membuktikan kedisiplinan dan profesionalisme. Kepada jajaran aparat pengadilan yang meraih ranking tertinggi di masing-masing kelasnya saya ucapkan selamat. Kerja keras kalian tidak bisa dibohongi selama setahun, terlihat jelas dalam evaluasi SIPP. Kalian luarbiasa.

SEMESTER II TAHUN 2019

L P	engadilan Negeri	Kelas IA Khusus dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi					TOTAL
	T		KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
\vdash		PENGADILAN NEGERI SIDOARIO	143.11	476.71	145.38	160.87	926.07 Poin
_1			2.10.10.	453.74	143.98	157.65	894.80 Poin
2	>2000	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	139.43	100111			
1 3	>2000	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	142.43	435.51	145.27	159.91	883.12 Poin
	72000	PENGRAPHI NEGETA PRESIDENT					

II. P	enzadilan Negeri	Kelas IA dengan perkara 1001 s/d diatas 2000 dengan Nil	ai impiementasi siPP Terui	1881			
			KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
_			150.31	522.08	145.90	161.14	979.43 Poin
1	1001~>2000	PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI	150.51				973.04 Pain
-	1001~>2000	PENGADILAN NEGERI JEMBER	147.95	517.29	144.65	163.15	9/3.04 Poin
_	2002 12000			515.46	145.73	162.77	970.91 Poin
3	1001~>2000	PENGADILAN NEGERI MALANG	146.95	515.46	143.73	102-77	5101521011

III. E	II. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1001 s/d diatas 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Terendah								
			KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL		
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)		
1	1001 ~ >2000	PENGADILAN NEGERI SAMARINDA	133.11	398.41	121.31	137.97	790.80 Poin		

IV. Pensad	/. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi									
T Congan	1		KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL			
NO JML	PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)			
1 1~100	-	PENGADILAN NEGERI PATI	147.65	521.57	144.60	164.58	978.40 Poin			
	-	PENGADILAN NEGERI KLATEN	145.34	520.59	131.65	162.7	960.28 Poin			
2 1~100	100	PENGADILAN NEGERI KLATEN	147.1	508.02	145.96	158.94	960.02 Poin			

ν	V. Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertendah								
Ė	- Cingounian regu		KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL		
ı	IO JML PERKAR/	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)		
Н	1 1~1000	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	142.22	417.96	116.35	160.59	837.12 Poin		

Pages Penilaiaian torondah adalah Standar pada Surat Dirien Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2010

VI. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 1001 s/d 2000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

****	crapo anon reger	Thomas as a major particular to the control of the	KINERIA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
h-	1001~2000	PENGADILAN NEGERI KISARAN	151.19	526.73	144.39	162.91	985.22 Poin
_		PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG	154.08	504.09	145.90	164.16	968.23 Poin
_		PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO	146.86	524.33	131.07	162.33	964.59 Poin
	2002 2000	PENGADILAN NEGERI TUBAN	153.37	498.98	144.71	165.13	962.19 Poin
_		PENGADILAN NEGERI BANGIL	144.52	509.23	145.96	161.77	961.48 Poin

VII. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 500 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

VIII.	rengaunan nege	ri kelas ib dengan pentara 300 sya 2000 dengan kinar mpa	KINERIA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
1	501~1000	PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG	149.98	531.56	145.53	164.58	991.65 Poin
_	201 1000	PENGADILAN NEGERI WONOSOBO	150.65	531.44	144.95	164.00	991.04 Poin
_	302 2000	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	152.83	528.79	145.93	163.16	990.71 Poin
_		PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO	148.57	531.07	145.75	164.40	989.79 Poin
_	302 2000	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	148.69	527.77	145.18	163.61	985.25 Poin

/III. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan perkara 500 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Terendah

	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERIA (Maks. 155.00)	KEPATUHAN (Maks. 533.00)	KELENGKAPAN (Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	TOTAL (Maks. 1000.00)
1	501~1000	PENGADILAN NEGERI SUKABUMI	144.76	368.81	132.00	165.16	810.73 Poin
	202 2000	PENGADILAN NEGERI SORONG	135.83	415.07	127.89	146.02	824.81 Poin
_	202 2000	PENGADILAN NEGERI TONDANO	139.67	426.87	141.86	142.08	850.48 Poin

IX. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan jumlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai implementasi SIPP Tertinggi

100. 1	engagnan reche	inclusive deligation particular particular and a second					TOTAL
$\overline{}$			KINERIA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
١,	1~500	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	153.15	514.57	145.91	163.70	977.33 Poin
H÷		PENGADILAN NEGERI BAU-BAU	149.53	516.10	146.00	162.32	973.95 Poin
H	2 200	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	146.32	514.64	146.00	162.21	969.17 Poin
- 5	1 500		144.63	526.34	130.21	162,60	963.78 Poin
4	2 300	PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO		517.07	131.85	162.97	959.76 Poin
1 5	1~500	PENGADILAN NEGERI BANGKO	147.87	31//0/	131.03	202.57	

^{*} Dasar Penilaiaian terendah adalah Standar pada Surat Dirjen Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2018

X. P	X. Pengadilan Negeri Kelas IB dengan jumlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai Implementasi SIPP Terendah												
-	I		KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL						
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks, 533,00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)						
			142.31	428.60	139.58	154.56	865.05 Poin						
1	1~500	PENGADILAN NEGERI MAKALE		120.00		164.58	885.54 Poin						
-	1mE00	DENGADILAN NEGERI LHOKSELIMAWE	149.26	425.70	146.00	104.50	003101110						

XI. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara 501 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

AL P	engaciian negel	Keles II deligari jarriani parriara sea sy	KINERIA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
			153.02	528.71	146.00	164.28	992.01 Poin
1	202 2000	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH		529.20	145.79	163.50	986.43 Poin
2	501~1000	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	147.94		145.59	162.00	981.75 Poin
3	501~1000	PENGADILAN NEGERI NGAWI	150.07	524.09			981.13 Poin
4	501~1000	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	149.41	521.19			
_	942		150.08	521.90	145.62	162.53	980.13 Poin
4	501~1000	PENGADILAN NEGERI NGAWI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN PENGADILAN NEGERI TAHUNA		521.19	145.82 145.62	164.71 162.53	

XII. Pengadilan Negeri Kelas II dengan jumlah perkara 501 s/d 1000 dengan Nilai Implementasi SIPP Terendah

XII.	Pengadilan Nege	ri Kelas II dengan jumlan perkara 501 syo 2000 dengan itin	i imprementation and			KESESUAIAN	TOTAL
			KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUMMAN	
NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks, 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
\perp			1,	355.65	119.88	148.28	757.16 Poin
1	501~1000	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	133.35			145.76	820.48 Poin
13	501~1000	PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI	138.49	409.47	126.76		
_	302 2000	DENCADU AN MECERI RANGVALAN	143.95	415.00	126.26	163.22	848.43 Poin

nlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai Implementasi SIPP Tertinggi

XIII.	Pengadilan Nege	ri Kelas II dengan jumlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai In	KINERIA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
NO	JIML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	(Maks. 155.00)	(Maks. 533.00)	(Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	(Maks. 1000.00)
-	1-500	PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA	152.26	531.34	145.62	164.01	993.23 Poin
	2 200		149.59	530.98	145.13	162.14	987.84 Poin
_	2 200	PENGADILAN NEGERI BANGLI	149.14	531.95	146.00	160.46	987.55 Poin
-	2 300	PENGADILAN NEGERI TAKENGON		518.37	146.00	164.69	976.96 Poin
4		PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG	147.90		131.69	162.90	976.43 Poin
5	1~500	PENGADILAN NEGERI NEGARA	152.80	529.04	131.03	102.50	
XIV.	Pengadilan Neg	eri Kelas II dengan jumlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai I	mplementasi SIPP Terenda	h			TOTAL
	- conguestion roug		KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	IUIAL

	Pengadilan Nege JML PERKARA	ri Kelas II dengan jumlah perkara 1 s/d 500 dengan Nilai II PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 155.00)	KEPATUHAN (Maks. 533.00)	KELENGKAPAN (Maks. 146.00)	(Maks. 166.00)	TOTAL (Maks. 1000.00)
-	1~500	PENGADILAN NEGERI WAMENA	138.35	412.52	100.56	113.65	765.08 Poin
-	2 500	PENGADILAN NEGERI MERAUKE	147.12	395.28	130.53	163.22	836.15 Poin
_	2 300		149.01	406.07	131.33	155.42	841.83 Poin
3		PENGADILAN NEGERI JENEPONTO		423.60	118.00	161.17	844.80 Poin
4	1~500	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	142.03			154.08	849.81 Poin
5	1~500	PENGADILAN NEGERI TOBELO	138.77	431.56	125.40	134,00	045/327000

Dasar Penilaiaian terendah adalah Standar pada Surat Dirjen Nomor 1153/DJU/HM.02.3/12/2018

BAB IV DAYA SERAP ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

IA INCENDIALUS BAT NEW PERMANULUS BAT NEW PERMANULU

	CONTROL CONTRO		PAGU DIPA		REALISASI SID B	ULAN LALU	т	REALISASI B	ULAN INI	REAL	SASI S/D BULAN IN			SISA DANA SID B	BULAN IN	KETERANG
KODE	JENIS BELANJA / MAK *}				TOTAL	14		TOTAL	%		TOTAL	%		TOTAL	%	KETEKAN
(2)	(3)		(4)		(6)	(6) = (6) / (4)		(7)	(8) = (7) / (4)	(1	9) = (5) + (7)	(10) = (9) / (4)		11) = (4) - (9)	(12) = (11) / (4)	13
NGE BY DE	Program Sakungan Massjemer & Polaksensen Tuges Teknis Lainnya Makkamak Agang	Pp.	4.502.777.600	fp.	4,448,833,366	90,74%	Rp.	585,500,472	7,83%	Re	4,632,624,638	MATN	Ra	70.152.962	1,49%	
1086	Fernbinsen Administrasi dan Pengelolaan Kauangan Badan Urusan Administrasi								-							
1088.979	 A MARIAMETER CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	lb.	5,400,000	flo	5,250,000	0,00%	Ro	158,000	2,78%	F#	5.600,000	100,50%	Rp .	- 5	0,08%	
9130	Prophilian Guguga, Jet Peberstit basis							200 000	2.78%	1	5.400,000	100,00%			0.00%	_
051 C 524112	Seben Perjalanan Dinas Dalam Kota	Ro	5.400,000	Rp	5.250.000	97.22%	13	150 000	2,78%	Hp.	5.400.000	100,00%	PD.	- '	0,00%	
1005.994.091	GALF day TUNJANGAN	Rp	3,990,006,000	Rp	3,621,196,385	91,31%	Ro	385,100,166	7,67%	Pp	3.907.308.571	99,68%	Np .	52,762,429	1,52%	1000
The state of the s	Sel Gel Pook PNS	-	1.601.899.000	150	+ 799 557 600	F2.52%	-	130 550 850	0.87%	100	1,890,256,290	99.30%	64	11.642.800	0.61%	
001 511111	Bat Gat Poscs PNS Fondsisten Gat PNS	Ho	1801399100		27.119	84.74%	10	1,689	£20%	(P)	26,805	90.02%	100	3.06	0.08%	
001 511119	Sel Tuniangen Guernifishi PNS	10	151 (25 000)		121,946,680	93.30%	13	3 954 690	(43%	100	130 903 370	99,83%	dis.	221690	0.17%	
001 511122	Bid Turanem Arek PMS	III.	45 329 000		42 339 114	90.76%	100	3 209 288	7.26%	Bo	45.328.402	100.00%	Bo	508	0.00%	
001 511123	Bel Terianem (Itráture PNS	I Iba	28 140 000		25 130,000	92.59%	Sh.	2,010,000	7.14%	Po	28 140 000	100.00%	Ho.	1000	0.00%	
001 511124		190	1,258,090,000		1.188.195.000	50.85%	100	81 806 500	3 1996	Per.	1,258,000,000	100.00%	Ri		0.00%	
001 511125	Sel Tuniansen Funosional PSS Sel Tuniansen RPh PNS	Ellin	127 822 000		120 374 665	93.34%	160	7.746.459	6.00%	Pip	127 821.154	100.00%	Ro	546	0.00%	
001 511126	Ed. Turbengen Beres PMS	l Ro	100 M2 000		92,825,185	\$1,82%	No.	8 193 ABD	8.11%	Po	100.806.640	99.93%	To.	73,360	0,07%	
001.511129	Eei, Uang Makan PHS	Ra	378 259 000		251 544,000	74.53%	Ra	53,963,000	14,34%	Ro	335.497.000	89.17%	Pp	40.762.000	10,63%	
001.511151	Sei Tuniangan Umum PNS	Ra	20 510,000	Re	19:045,000	92,89%	Ro	1,655,000	7,14%	Ro -	20.510.003	100.00%	Ra	A1100 (100 Feb.	0.00%	
ANCHES DISTORTANT	OPERASIONAL due PEMELHARIANN KANTOR	Ra	907.389.000	¥p	812,487,181	66,55%	Re	77.351.295	8,53%	Ra	860.830.467	\$8,05%	Pa	17.450.503	1,82%	
. 657	Programma programma Control cost da Paris Norsan Pediamons		0.520200		3120,31400	775 W.S.		20///-	300					100000	200	
602 A	Station to the Control of Persons and Pers															
002.A.52 1111	Busine Replace Parkentone:	Ra	275 384 000	Re	233.477.276	88,35%	1/2	38 800 000	13,64%	Ro	275 367 276	99,30%	Ro	16724	0.01%	
002 A 521119	Existia Barang Operasional Lamova	Rp	2 500 000	100	3.448.506	06,53%	Ra Ra	-	0.00%	Ra	2,446,505	98,53%	Rp	51.405	1.47%	
002 A 521611	Belante Danaro Pensidean Danaro Konsumsi	Re	45.597.000	Sp	40.596.850	100,00%	Ra:		400,0	No.	40,596,650	100,00%	Ru	150	0.00%	
002.0	Langgaran Daya Gan Jasa					140,000		The State of St	1000000	70.0	2300000		100	100000000000000000000000000000000000000	75.035.5	
002.8.521111	Burns Facertum Persantons	Ra	63,639,000	130	88.317.645	70,82%	Re	15.406.000	15,45%	Ra	81723.645	67.28%	Ro	11,915,385	12,72%	
042.8.521114	Burania Pengiriman Sorot Dinas Pos Posat	Rp	9,300,000	Re	8.575.000	50',20%	Po	995.500	6.45%	Ra	9.170,500	96,01%	Ro	129,500	1,39%	
002 8 522111	Selanja Langparian Lishk	Ra	135,386,000	Re	122,439,751	90,44%	Rg Rb	12.694,795	9.37%	Ha .	135.124.517	99.81%	Hp.	261.483	0.19%	
002.6.522112		Re	804000	Fip.	747.400	90',97%	Pto:	96.520	7,02%	12	804,000	100,70%	132		2,00%	
002.C	Fundheren Kator					2000		- 000000	0.000	100				-	1900	-
002.C.521811	Existis Berand Persidiaan Barang Konsumsi	Rp	5.000.000	Rp.	5,738,600	74,77%	Pp.	1,228,500	24,63%	R	4.965,100	99.30%	Fig	34,900	0.70%	
002 C 523111	Seber Pemailteren Gedung den Bengunen	Pæ	100 648 000		100.638,750	99,98%	Ro	15,000	0.01%	Ro	100 843.750	100,00%	No.	4.290	0.00%	
002 C 523110	Belon Pemelhasan Cedury dan Bargunah Lahriwa	Re	25 290 006		23.513.000	90,59%	Rp Rp	1.517.000	0.41%	Ella:	25.230.000	100,00%	150		0,00%	
162 C.523121	Beton Penaliharan Penalah dan Mede	P\$	114 000 000	Np.	113,998,656	100,00%	R2	10000	0,00%	Ro.	113,996,656	100,00%	Ro	1344	0,02%	
002 D	Pentheyaran Tarkell Pelaksassan Operasional Kantor					2000		-	10000		and the same of	- The sales	-		0.50%	
	Piosor Operational Saturn Kena	Re	53 160 000	194	44,300,000	83,39%	Fig	8.860,000	11,07%	FR3	53 100 000	100,00%	Fg	4	0,00%	
002 F	Jemuen Tems		*******		w 100 000	******			2000		0.485,000	75.750	-	707.060	0.50%	_
002.D.521119		Fig	6.441,006	70	6.408.900	99,52%	Ha.		6,00%	173	6.408.900	89.50%	176	32,100	1,50%	
002 G	Konsultesi Ke Tingkal Bending					-			1000		1000000	100.000			0.01%	
002 G 524111		Ra	44,200,000	198	44,196,768	00,08%	Ra		0,00%	PG .	44 196.768	98.99%	192	9.232	127%	
002 H	Bieya Sewa					10000			-		20011		-		222200	_
002 H 522 141		80	5,000,000	Ro		0.00%	Ra		0,00%	Pip.	- Marie and	0,00%	Ho.	5 300 000	100,00%	
005.81.02	Program Peningkatan Sarasa dan Prasarana Aparator Mehitamah Agung	Ro	36,003,000	Pla	37,793,500	99,46%	Rp		0.00%	180	37,783,500	98,48%	Rp	225.500	0,54%	
2071 951	Pannadage Sarana dan Prasarana di Lindkumpan Mahkamah Anana			11			11						11			

ctivate W wide Mails. SE_MM NP. 19700411 200002 2 00 to to Settings

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TANUN 2019 BULAN: DESEMBER 2019

KERIKODE BATKER : PEKGADILAN NEGERI GUNUNG SUDIH (6608)

PAGIAN ANDGRIUN

: MANKAMAH AGUNG (NIS), DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UNUM

DEPARTUL DIPA

- SE DIRACKELI 2 (ESCHOOLIS)

S.	Kooe	ANS ISLANA (MAK 1)	533	PAGU DIPA	533	REAL SANSO	BULAN LALLS	28310	FEATSAS I	BLIAN DE	100	REALISASI SE	BULANIN	E COLUMN	BISA DANA S	ID BULAN IN	Francis Co.
873	ADDRESS TO	THE PLAN STORY PROPERTY SERVICES AND THE SERVICES	12		38	TOTAL	中間企業事業を成る	22.5	TOTAL .		802	TOTAL	· 医斯克斯氏	0000	TOTAL	0.05708 0.0514	KETERA
16	20 (2)	(A)	25	\$2(4)\$250	0.00	(6)	$(0) = (5) \times (4)$	2505	[7] (2) (4)	(8) = (7) / (4)	19	# (5) F (7)	- (10) + (9)/2 (d)	(11	(# (4) £ (9) .	(12) = (11) / (4)	688613
æ	MANUAL PROPERTY.	The second secon		SEPTEMBER 1	23	MENT OF THE	网络阿拉尔亚斯特		Married and	BEET CARE	N/N	Tanten ar	Mary Comme	o de	1000)	Mark through the	MATERIA
-1	1049	Peningkatan Manajersan Penadika Umum	┖—														
-	1048.003	POS BANTUAN HURUM	Ra	31,200,000	Ra	31,200,000		<u> </u>			L.			1			
æ	Service of the last	Particular in the second secon	PO D	11.201.010		31,200,000	100,00%	Pp STATE		0,00%	Rρ	31,200,000	100,00%	Rp		0,00%	
٦	921	Pelatsanson Pos Pelavantn Hukum	neas.	21,297,000	1500	1000	146.9%	18380		ESCHOOL SERVICE	100	91.500.000	160,000			A CONTRACTOR	100
7	522131	Giara Jasa Konsulan	Da	31,200,000	l	31,200,000	100,00%	Re		0.00%	١			-			
╛		parje resonance and a second	7	31,200,000	17	31200.000	100,00%	HØ.		0,00%	P\$	31,200,000	100,00%	Rp		4,00%	
	1049.005.UL3	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Perlama di Witayah Lesapung	Rp	250,084.000	Rp.	258.001.000	94,80%	Rp	2.865.000	1,11%	Pp	258.897,100	99,92%	Rp.	216.900	0,00%	
8		· 电电子设计算机 计图像设计 经产品的 经产品的 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	Fp	对种种	100	NE 752 600	500 Stone 18	Te.	190104	ACT TO SE	1570	44.545.653	THE RESERVE	0000	200	0.501.0PM	Charles of the last
	521211	Belanja Bahan	Rp	5.329,000	R)	5.170.000	97,18%	Rp.	160,000	2,82%	Ro	5.320.000	100,00%	Ro		0,00%	Rep Alle
	521511	Belarja Barang Persedizan Barang Konsumsi	Пp	83,650,000	Ra	81.987.900	95,94%	Rp	2.532.000	3,03%	Pa	83,019,900	99,90%	Ro	30.100	0,04%	
	PROPERTY.	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	RI	- (Caster)	26	17.485.00	STREET, STREET	1500	STEED!	STATE OF THE PARTY	100	2010als 000	STORY OF THE	I I THE	BAR TIN	360(3) 32(S)	5607
_	524113	Belerja Perjalanan Othos Bolam Kota	Pφ	11,495,000	Яp	11.480.000	90,87%	Fp.	-	0,00%	Pφ	11,400,000	99,67%	Ro	15000	0,13%	SECTION.
ц	0000000000	建设设施的证据的证明的证明的证明的证明的证明的证明	Fig.	\$1,018.005	100	15 -100 591	CONTRACT OF STREET	200	10 To	600	0.0	S 31,246 007	Canada Y	1220		THE RESTRICT	Section
-	521211	Delerje Baten	Rρ	77.550.000	Rp.	77.550.000	100,60%	Rp		0,00%	Fig	77,550,000	100,00%	Ro		0,00%	_
_	524113	Deben perjalanen dinas Calam kola	Pρ	3.710,000		3.640.000	68,11%	Pp	70,000	1,89%	flp	3,710,000	100,00%	Ro		0.00%	
翻		STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN C	Fig.	(5,812,836)		15.7980005	W 124	P6		STATE OF THE PARTY	步。	15016 361	194,975	line as	1,925	25/20/20/20	ESSE
┙	521211	Delwijs Estan	Pφ	15.810,000	Rp.	15.766.000	00,72%	Rp	44,000	0,29%	Яp	15,810,000	100,00%	Po		0,00%	
2	The Control		9	1986	쪵	28,96,002	100 100 100	10/		400		ROLLEN	01-11-20 (ES) (ES)	100		The second second	200
-1	521114	Delenja Pengirinan Sarat c'has pos pasat	Rφ	-	Rp		0,00%	R ₀		0,00%	Яp	-	0,00%	2φ		0,00%	
4	524113	Belanja Perjatenan Dinas Dalam Kota	Pφ	26,040,000	Rp	25,040,000	100,00%	Rp		0,00%	Pρ	28,340,000	100,00%	Rp		0,00%	
4			80	91.32.90	10	M300 (42)			7.14	0305	李 章	\$1.03(200)	BC(DS	PR CO		T. C. W. S. C. L.	250
	521114	Belanja Pengiriman Saral diti as poe pusat	Pφ		Rp.		0,00%	Rφ	-	0,00%	Rp		0,00%	Rp		0,00%	
3	524113	Belanja Perjatanan Cinus Balam Kota	ΡÞ	25,000,000	Rp.	34 930,000	99,80%	R ₀	70,000	0,20%	Pρ	35,000,000	100,00%	Rp	-	0,00%	
4			ŀφ	GLM2	636	PHESIS.	0.4478%	94	20000		1	150	THE RESERVE	NE S	100	THE STREET	
	521114	Belanja Pengiriman Surat dihas pes pusat.	Rp	60:000	Rp.	69,000	66,33%			0,00%	βp	59.000	91,33%	83	1.000	1,87%	
J	524513	Gelonja Perjalanan Cinas Calum Kota	Ηp		Rp	-	0,00%	Pφ		0,00%	Rþ		0,00%	Rp		0,00%	
			Re l	#2.54z	146	202305		100	Vicini.		Fa .	3458	THE PERSON	120	77,990		37835
٦	21114	Belanja Pengiriman Surzi Dinas pos Pusat	Řo	449,000	Ro	278,200	81,56%	-	2003 S (2)	ALC: UNKNOWN		SECTION.	F1.4.4.13.7				200
-6	24113	Belanja Perjelenan Oran Datan Kota	Pb	448,000	Ro	2/6.200	0.00%	Rp Ra		0,00%	Rp C	278.200	01,90%	Pp	170,800	38,04%	
٦ſ		and of the same of	76	- 1	ng.	-}	0,05%	ığ.		0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	_ :	0,00%	
늙	State Victoria	JUNIAH	(m)	000000000	(Water)	447 and 444 T			Talant are	The Service of	_	Salve Brie					
200	SAME STATE OF THE PARTY.	JUNEAH	PQ :	290.284.000	КФ	287.201.100	98,94%	Rp :	2.866.000	0,99%	R47	DO:009 100	794.0N	Rp.	216.900	0,07%	3400

BAB V

PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari - Desember 2018

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transpransi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Tekhnologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Gunung Sugih berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi

Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 29

yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-gunungsugih.go.id.* Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama tahun 2018 terdapat 132 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, desk informasi atau PTSP, komputer server, jaringan computer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wireless.

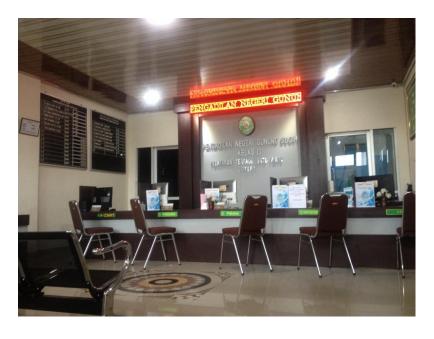
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu diruangan Ketua dengan Nomor : (0725) 529858 dan Ruangan Panitera dengan Nomor : (0725) 529859 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon tersebut.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 50"

Pada tahun 2011 web dan email web Pengadilan Negeri Gunung Sugih beralih ke pngunungsugih. *go.id* dengan nama website http://pn-gunungsugih.go.id, nama email yang digunakan untuk keperluan semua bagian Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah gunungsugihpn@gmail.com, hingga saat ini pada tahun 2019 sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut:



- PC Server 1 Unit
- PC clien 18 unit
- Website dengan nama http://www.pn-gunungsugih.go.id
- Sistem Informasi Perkara dengan nama http://SIPP.pn-gunungsugih.go.id
- Finger Print 2 buah
- Instalasi CCTV 1 set dengan 16 camera
- Instalasi TV Media Center 3 set
- 1 buah Modem Speedy
- 4 buah Switch Hub dan Router Wifi
- 11 buah access point
- 17 Unit Laptop

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-gunungsugih.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik,pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

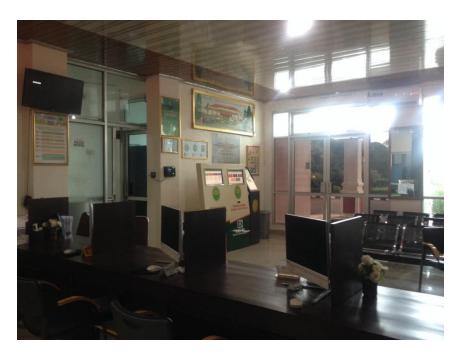
Secara umum informasi yang dapat dijelaskan informasi yang telah ditampilkan diwebsite Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdiri dari:

- 1. Data Utama: Home, Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Visi dan Misi, Peta wilayah Hukum, Informasi Biaya Perkara, informasi wilayah hukum, informasi biaya relaas panggilan, berita kegiatan pengadilan, informasi lelang pengadaan barang dan jasa, informasi alur/ tahapan perkara perdata dan alur/tahapan perkara pidana
- 2. Layanan Informasi dan pengaduan, yaitu penjelasan tentang layanan informasi dan prosedur pengaduan yaitu:
 - a. Penjelasan tentang layanan informasi, cara memperoleh informasi, formulir permohonan informasi dan pedoman anominisasi.
 - b.Penjelasan tentang pengaduan, prosedur pengaduan, hak pelapor/terlapor, formulir pengaduan, data pengaduan dan alur pengaduan.
- 3. Informasi tentang Posbakum, yaitu penjelasan tentang pos bantuan hukum di pengadilan yang meliputi informasi tentang prosedur Posbakum, prosedur bantuan hukum pidana, prosedur bantuan hukum perdata, gambaran bantuan hukum dan ilustrasi bantuan hukum.
- 4. Data LAKIP: informasi tentang laporan kinerja instansi pemerintah Satker Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2016 beserta Rencana Stretegis Tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2014 yang dapat didownload oleh publik dalam bentu file Pdf.
- 5. Informasi Perkara Pidana dan Perdata: memuat informasi perkara pidana dan perdata tahun 2016 dan 2017 yang dilengkapi dengan pencarian lacak perkara pidana perdata tahun 2016 dan 2017 serta informasi dalam bentuk grafik. Sedangkan untuk penelusuran perkara pidana dan perdata tahun 2016-2017 termasuk informasi jadwal sidang dan proses persidangannya ditampilkan dalam aplikasi lain yaitu SIPP yang dapat diakses online lewat sub domain http://SIPP.pn-gunungsugih.go.id
- 6. Publikasi Putusan, pengadilan negeri Gunung Sugih berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana ataupun perdata kedalam website supaya dapat diakses oleh publik, dalam usahanya pihak Pengadilan Negeri Gunung Sugih sudah mencoba upload putusan dari tahun 2015 hingga 2017 meskipun belum 100% perkara yang putus diupload ke website.
- 7. Laporan Perkara Pidana: memuat laporan perkara pidana yang terdiri dari laporan bulanan perkara pidana, laporan bulanan kualifikasi perkara pidana, laporan bulanan keuangan perkara pidana, laporan bulanan evaluasi perkara pidana, laporan perkara banding, kasasi, laporan perkara PK dan laporan perkara yang dimohonkan grasi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
- 8. Laporan Perkara Perdata: memuat laporan perkara perdata yang terdiri dari laporan bulanan perkara perdata, laporan bulanan keuangan perkara perdata, laporan perkara banding, Kasasi, PK dan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
- 9. Laporan Keuangan: memuat laporan keuangan yang terdiri dari informasi DIPA Pengadilan Negeri Gunung Sugih, laporan bulanan realisasi anggaran DIPA 01 (BUA)

- dan DIPA 03 (Dirjen Badilum). Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
- 10. Informasi lain yang ikut melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat PN Gunung Sugih, data Hakim, data pegawai, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di PN Gunung Sugih.

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah disediakan bagian depan / lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas ruang persidangan baik bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi maka petugas piket yang akan menberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan Pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 50 Inc.



Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

- Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

- 3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
- 5. Pengiriman file hal hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
- 6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

2 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- b. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum.
- d. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.



Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk

Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 34

membuka website Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalu website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasilangsungmenyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih hingga akhir tahun2017 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduanpada loket pengaduan masih nihil.

3. ANGGARAN

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Gunung Sugih mendapat dana pengadaan perangkat IT untuk pengadaan Komputer Server dan instalasi jaringan listrik dan penambahan jaringan listrik dengan nilai anggaran Rp. 107.500.000,- pengadaan laptop 4 (empat) unit dengan nilai anggaran Rp. 52.000.000,-

LAMPIRAN XII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

Jalan Negara No. 100 GunungSugih Lampung Tengah 34161

Telp/ Fax. (0725) 529858 - 529859

Web: http://www.pn-gunungsugih.go.id email:

gunungsugihpn@gmail.com

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari – Desember 2019

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung-jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transpransi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Tekhnologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 36

lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Gunung Sugih berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia dikantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-gunungsugih.go.id.* Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama tahun 2019 terdapat 132 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, desk informasi atau PTSP, komputer server, jaringan computer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon/ faximile serta akses internet melalui LAN dan wireless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

2. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki sarana telepon 2 (dua) unit yaitu diruangan Ketua dengan Nomor : (0725) 529858 dan Ruangan Panitera dengan Nomor : (0725) 529859 dan 1 (satu) unit mesin faximile dengan nomor yang sama dengan nomor telepon tersebut.

Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) dan pada lobi pengadilan juga sudah dilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profile pengadilan dalam bentuk TV 50"

Pada tahun 2011 web dan email web Pengadilan Negeri Gunung Sugih beralih kepngunungsugih. *go.id* dengan nama website http://pn-gunungsugih.go.id, nama email yang digunakan untuk keperluan semua bagian Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 37

gunungsugihpn@gmail.com, hingga saat ini pada tahun 2019 sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

- PC Server 1 Unit
- PC clien 2 unit
- Website dengan nama : pn-gunungsugih.go.id
- Sistem Informasi Perkara dengan nama http://SIPP.pn-gunungsugih.go.id
- Finger Print 2 buah, dengan keterangan 1 unit aktif dan 1 unit dalam kondisi rusak
- Instalasi CCTV 1 dvr dengan 16 camera
- Instalasi TV Media Center 2unit terletak di lobby dan ruang tunggu.
- 1 buah Modem Speedy (Telkom)
- 1 buah Switch Hub dan Router Wifi (24 port)
- 10 bush access point
- 1 Unit Laptop

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih antara lain:

b. Website Pengadilan Negeri Gunung Sugih

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mempunyai website resmi yaitu *pn-gunungsugih.go.id* sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik,pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

Implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang dapat dijelaskan informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdiri dari:

- 11. Data Utama: Home, Sambutan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Visi dan Misi, Peta wilayah Hukum, Informasi Biaya Perkara, informasi wilayah hukum, informasi biaya relaas panggilan, berita kegiatan pengadilan, informasi lelang pengadaan barang dan jasa, informasi alur/ tahapan perkara perdata dan alur/tahapan perkara pidana
- 12. Layanan Informasi dan pengaduan, yaitu penjelasan tentang layanan informasi dan prosedur pengaduan yaitu:

- a. Penjelasan tentang layanan informasi, cara memperoleh informasi, formulir permohonan informasi dan pedoman anominisasi.
- b. Penjelasan tentang pengaduan, prosedur pengaduan, hak pelapor/terlapor, formulir pengaduan, data pengaduan dan alur pengaduan.
- 13. Informasi tentang Posbakum, yaitu penjelasan tentang pos bantuan hukum di pengadilan yang meliputi informasi tentang prosedur Posbakum, prosedur bantuan hukum pidana, prosedur bantuan hukum perdata, gambaran bantuan hukum dan ilustrasi bantuan hukum.
- 14. Transparansi : informasi tentang laporan kinerja instansi pemerintah Satker Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahun 2019 beserta Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Penetapan Kinerja Tahun 2020, Rencana Kinerja Tahun 2020 yang dapat didownload oleh publik dalam bentu file Pdf.
- 5. Layanan Publik: memuat informasi mengenai pelayanan informasi, PTSP, syarat dan tata cara Pengaduan, alur informasi, dasar hukum keterbukaan informasi, prodeo, informasi tilang, SMS informasi perkara, VA Kasasi/PK, Indeks Kepuasan Masyarakat, mengenai jadwal sidang dan proses persidangannya ditampilkan dalam aplikasi lain yaitu SIPP yang dapat diakses online lewat sub domain http://SIPP.pn-gunungsugih.go.id
- 6. Publikasi Putusan, pengadilan negeri Gunung Sugih berusaha untuk meng-upload putusan baik itu pidana ataupun perdata kedalam website supaya dapat diakses oleh publik, dalam usahanya pihak Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah meng-upload putusan dari tahun 2015 hingga 2019dan sejak tahun 2019 perkara yang putus langsung diupload ke website.
- 7. Laporan Perkara Pidana: memuat laporan perkara pidana yang terdiri dari laporan bulanan perkara pidana, laporan bulanan kualifikasi perkara pidana, laporan bulanan keuangan perkara pidana, laporan bulanan evaluasi perkara pidana, laporan perkara banding, kasasi, laporan perkara PK dan laporan perkara yang dimohonkan grasi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
- 8. Laporan Perkara Perdata: memuat laporan perkara perdata yang terdiri dari laporan bulanan perkara perdata, laporan bulanan kualifikasi perkara perdata, laporan bulanan keuangan perkara perdata, laporan perkara banding, Kasasi, PK dan laporan perkara yang dimohonkan eksekusi. Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.
- 9. Laporan Keuangan: memuat laporan keuangan yang terdiri dari informasi DIPA Pengadilan Negeri Gunung Sugih, laporan bulanan realisasi anggaran DIPA 01 (BUA)

dan DIPA 03 (Dirjen Badilum). Semua laporan tersebut dapat diakses atau didownload oleh publik dalam bentuk file Pdf.

10. Informasi lain yang ikut melengkapi isi dari website pengadilan adalah informasi tentang nama-nama pejabat PN Gunung Sugih, data Hakim, data pegawai, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari semua jabatan yang ada di PN Gunung Sugih.

c. Meja Informasi

Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyediakan sarana meja informasi yang terletak di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah disediakan bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih setiap harinya telah ditunjuk Petugas untuk melayani pencari informasi dan juga petugas ruang persidangan.Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi Petugas PTSP yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di PTSP juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan pada lobi pengadilan juga sudahdilengkapi dengan info media center yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dan profil pengadilan dalam bentuk TV 50 Inc.

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk :

- Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi TanjungKarang dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi TanjungKarang dan Ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
- 3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- 4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
- 5. Pengiriman file hal hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
- 6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

d. Server local dan Server Hosting.

Server lokal yang dimiliki oleh Pengadilan NegeriGunung Sugih dengan spesifikasi Fujitsu RX 1330 MI Memori 4 GB sudah sesuai standard untuk menjalankan aplikasi CTS 3.20.5 yang diakses/input oleh lebih dari pengguna 25 PC/Laptop.

Begitu juga dengan server hosting tempat website berada dengan kapasitas penyimpanan file sekarang ini memiliki memori 4 GB dan dirasa cukup untuk menjalankan keterbukaan informasi publik.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Laporan Akhir Tahun Kinerja PN Gunung Sugih hal 40

Berdasarkan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- e. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- f. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- g. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang dibantu oleh staf hukum.
- h. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam menyiapkan data.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untukmemperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalu website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasilangsungmenyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih hingga akhir tahun2019 tidak ada Keberatan atau Pengaduan dari Pemohon Informasi, sehingga register pengaduanpada loket pengaduan masih nihil.

4. ANGGARAN

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Gunung Sugih mendapat penambahan perangkat IT untuk pengadaan Server merk Fujitsu TX1330M4 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai harga keseluruhan Rp 84.310.000,-, Rak server merk Indorack 19' standing close sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai harga keseluruhan Rp 9.866.590,-, PC unit merk HP AIO Pro One 600 GS sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai harga keseluruhan Rp 48.749.600,-, Uninterruptible Power Supply (UPS) merk APC Back-UPS sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai harga keseluruhan Rp 10.136.000,-, dan komputer jaringan lainnya merk Vestouch Interactive Android KiosK 21,5 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai harga keseluruhan Rp 17.840.000,-.

LAMPIRAN XII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal : 5 Januari 2011

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

	Jumlah	Waktu Rata-	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah	Alasan Permohonan Yang Ditolak***			
Jenis Informasi	Permohonan*	Rata Pelayanan**			Permohonan Yang Ditolak	Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya	
Perkara & Putusan	49	1 Hari	49	-	-	-	-	-	
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengawasan &	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pendisiplinan								
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	3	1Hari	3	1	-	-	-	-
Total ****	52	-	52	-	-	-		-

^{*} Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

^{**} Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

^{***} Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

^{****} Jumlah total dari masing-masing – masing kolom.

LAMPIRAN XII SURAT KEPUTUSAN KETUA MA

: 1-144/KMA/SK/I/2011 Nomor

Tanggal : 5 Januari 2011

DATA PERMOHONAN INFORMASI KE PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH

NO	NAMA	INSTANSI	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA
1	Firmansyah, SH., MH	Polres Lampung Tengah	POLRI	PetikanPutusan no : 43/Pid.B/2018/PN Gns
2	Firmansyah, SH., MH	Polres Lampung Tengah	POLRI	PetikanPutusan an. ArfanSalehTanjung
3	ZainulFachry, S.Ik	PolsekMenggala	POLRI	PetikanPutusan No. 320/Pid.B/2015/PN GS
4	MujiHarjono, SE	PolsekTerusanNun yai	POLRI	PetikanPutusan an. Putra Sanjaya Bin Sarwani
5	PengabdiBapip	perseorangan	swasta	PetikanPutusan no. 382/Pid.B/2018/PN Gns
6	RinaMayasari	UNILA	Mahasiswa	Salinanputusan no. 228/Pid.B/2017/PN GnsdansalinanputusanKas asi no. 295K/Pid/2018
7	M. Subhan	LBH Musba	swasta	Salinanputusan no. 476/Pid.Sus/2017/PN Gns
8	Hidayanto, SH	LBH Antara	swasta	SalinanPutusan no. 01/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns
9	Hidayanto, SH	LBH Antara	swasta	Salinanpenetapandiversi no. 04/Pid.Sus- Anak/2019/PN Gns
10	Donny Hendridunand, SE., MH	PolsekTerbanggiB esar	POLRI	SalinanPutusan an. RendiPalendra Bin M. Umar
11	RiaSulistiawati	UNILA	Mahasiswa	Salinanputusan no. 166/Pid.Sus-LH/2018/PN Gns
12	AstriWijayanti	UNILA	Mahasiswa	Salinanputusan no. 425/Pid.B/2017/PN Gns
13	Donny KristianBara'langi, S.Ik., MM	Polres Lampung Utara	POLRI	PetikanPutusan an. ArisYudiNovandra Bin Ahmad
14	Firmansyah, SH., MH	Polres Lampung Tengah	POLRI	PetikanPutusan no. 430/Pid.A/2013/PN Gns
15	LoekmanDjoyosoemarto	Pemkab Lampung Tengah	Bupati	Data anakberhadapandenganhu kumtahun 2019
16	M. Sholihin	BPS Lampung Tengah	Kepala BPS Kab. Lampung Tengah	Data perkara yang diterimadanputustahun 2018
17	Hendy Prabowo, S.Ik	PolsekNatar	POLRI	PetikanPutusan an. SamsiApero Bin Madzen
18	Iswanto Bin Rimin	perseorangan	sopir	Salinanputusan no. 1/Pdt.G/2019/PN Gns
19	Hidayanto, SH	LBH Antara	swasta	Salinan putusan
20	Gigih Andri Putranto, SH., S.Ik	Polres Metro	POLRI	Salinan Putusan an. Sastra Irawan Bin Ahmad Arif

21	Hidayanto, SH	LBH Antara	swasta	Salinan Putusan
22	M. Barly Ramadhany, SH., S.Ik	Polda Lampung	POLRI	Petikan Putusan an. Suryanto als. Mansur Bin Tumijo, dkk
23	Eko Heri Susanto, SH., MH	Polsek Seputih Banyak	POLRI	Petikan Putusan an. Suroyo Bin Tugiran
24	Donny Hendridunand, SE., MH	PolsekTerbanggiB esar	POLRI	SalinanPutusan an. Rahman Agung Bin Tazarudin
25	ZainulFachry, S.Ik	Polsek Menggala	POLRI	SalinanPutusan an. Rido Pratama Bin Kusmanto
26	Yuswantoro	Polsek Gunung Sugih	POLRI	SalinanPutusanno. 24/Pid.B/2015/PN GS
27	Sayidina Ali	Polsek Bangunrejo	POLRI	SalinanPutusan an. Suprapto Bin Sunarto
28	Des Herison Syahputra, S.Ip., MH	Polsek Seputih Banyak	POLRI	SalinanPutusan an.Muslihan als. Mus Bin M. Yusuf
29	Yudi Naga Mulya	perseorangan	wiraswasta	SalinanPutusan an. Bahtiar Bin Matsari
30	Hi. Ruslan Siregar	perseorangan	swasta	SalinanPutusan an. Ahmad Harahap
31	Kriswati Sulistyorini,SH	perseorangan	advokad	SalinanPutusanputusan PK
32	Idalaila	perseorangan	Ibu rumah tangga	SalinanPutusanno. 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns
33	Yuda Wiranegara, SH., S.Ik	Polres Lampung Tengah	POLRI	PetikanPutusan an. Rahmad Efendi als. Ucok Bin Muslim
34	Riki Ganjar Gumilar, S.Ik	Polsek Terbanggi Besar	POLRI	SalinanPutusan an. Angga als Yosef Bin Pendi
35	Yuswantoro	Polsek Gunung Sugih	POLRI	SalinanPutusan an.Heri Syah Putra Agung Bin Hairan
36	Heri Alfian, SH., MH	Kantor Pengacara Heri Alfian & Rekan	Pengacara	Salinan putusan no 360/Pid.Sus/2018/PN Gns jo 12/Pid/2019/PT Tjk
37	Salib	LSM	wiraswasta	Salinan putusan no. 133/Pid.B/LH/2018/PN GNs
38	Yosef Armaly	advokad	advokad	Salinan putusan no. 248/Pid.B/2019/PN Gns
39	Edi Suhendra	Polsek Terusan Nunyai	POLRI	Salinan putusan an. Mansur als. Yin Bin Samat
40	Andre Try Putra, S.Ik, MH	Polres Lampung tengah	POLRI	Salinan putusan an. Soni Bin Nurili
41	Prim Haryadi	Dirjen BADILUM	PNS	Salinan putusan PNS Pemkab Lampung Tengah
42	Aladin Efendi	Polsek Seputih Raman	POLRI	Salinan putusan an. Agustinus Andriyanto Bin Slamet
43	Charis Mardiyanto, SH., MH	PT Tanjung Karang	KPT	Salinan putusan terpidana PNS
44	Aurhey Realita Suprapto	perseorangan	wiraswasta	Salinan putusan cerai an. Agung Kurniawan
45	YudaWiranegara	Polres Lampung Tengah	POLRI	Petikan putusan an. Ahmadi als. Mat Bin

				Tamrin
46	YudaWiranegara	Polres Lampung Tengah	POLRI	Petikan putusan Danu Wijaya Bin Agusni
47	YudaWiranegara	Polres Lampung Tengah	POLRI	Petikan Putusan Indra Bin Sahrul
48	Rahmin	Polsek Banjar Agung	POLRI	Petikan putusan Mulyadi Bin Asnawi
49	Rahmin	Polsek Banjar Agung	POLRI	Petikan Putusan Joni Bin Hasan Basri
50	Dr. Erlina B, SH., MH	UBL	Dekan	salinanputusanno. 290/Pid.Sus/2018/PN Gns
51	Edi Suhendra	Polsek Terusan Nunyai	POLRI	PetikanputusanDaeroni als. Roni Bin Tamrin
52	YudaWiranegara	Polres Lampung Tengah	POLRI	PetikanPutusanIndra Bin Sahrul

LAMPIRAN XII

SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

Tanggal: 5 Januari 2011

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

		Tanggapan	Atasan PPID			Hasil Mediasi di Komisi		tusan Komisi
	Jumlah	atas Kel	peratan**	Penyelesaian	Inform	asi****	Inform	nasi****
Jenis Informasi	Pemohonan Keberatan *	Menerima	Menolak	Sengketa ke Komisi informasi	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-

Total *****	-	-	-	-	-	-	-	-

- Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
- * Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi
- * Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi
- * Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal
- * Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.
- * Jumlah total dari masing masing kolom.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Gunung Sugih bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern:

a) Sarana dan prasarana, dalam menjalakan keterbukaan informasi publik diperlukan saranateknologi informasi seperti komputer yang cukup pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet. Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih kurangnya sumber daya manusia, selainitu tempat khusus yang reprentatif untuk desk informasi yang dilengkapi dengan seperangkat meubelair yang didukung Iptek sehingga memberikan kenyamanan bagi publik, fasilitas yang ada hanya berupa meja informasi yang dilengkapi dengan unit komputer untuk informasi perkara.

Disamping itu juga banyak komputer yang perlu diganti guna mendukung dalam pekerjaan pada tiap-tiap ruangan khususnya bagi tenaga fungsional yang menggunakan komputer secara langsung untuk menginputkan data perkara dalam aplikasi SIPP/CTS

- b) Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai), meskipun secara umum pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sugihmenguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti Panitera Pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.
- c) Pegawai Yang Terbatas, Kekurangan Pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnyapenerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Gunung Sugih misalnya belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai administrasi lainnya dalam ini Kaur Umum, Staf Pidana, Staf Perdata yang mempunyai tugas pokok masingmasing meskipun para pegawai tersebut berlatar belakang IT.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a) Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendalam dalam keterbukaaninformasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer tetapi juga masih menyediakan pengumuman manual bagi pengunjung di papan pengumuman misalkan seperti jadwal sidang karena sebagai pengunjung tidak paham cara mengoperasikan desk informasi.
- b) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dansebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kab. Kabupaten Lampung Tengah dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mendapatkan informasi putusan ketimbang melihat CTS online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain :

- 1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagi pusat informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
- 2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi On Line
- 3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan menfaatkan Sumber Daya yang ada.
- 4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sistem informasi yang terintegritas dengan Website Dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai berikut:

 Pengadaan Sarana dan prasarana melalui pengusulan DIPA secara bertahap, Pengadilan Negeri Gunung Sugih sedang mengusulkan untuk rencara kerja anggaran tahun 2018 pengadaan komputer, laptop dan printer temasuk komputer khusus untuk meja informasi, jika pengusulan ini disetujui maka akan meningkatkan dalam keterbukaan informasi publik.

sedangkan untuk tahun selanjutnya dapat diusulkan untuk pengadaan server dan sarana

pendukung lainnya.

2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Negeri Gunung

Sugih baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi

sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITASPELAYANANINFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website

dinamis Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer

dan akses internal, diharapkan:

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan

Pengadilan Negeri Gunung Sugih seperti Profil, Informasi dan Layanan untuk pengunjung

umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.

2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang

teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.

3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya

sebagai sumber daya.

4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang

lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem

yang dibangun.

5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemusatan semua informasi yang

ada di Pengadilan Negeri Gunung Sugih khususnya.

6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah

hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan

sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi dimasa yang akan datang.

GunungSugih,8Januari 2020

Ketua

Syamsul Arief. SH., MH.

NIP. 19760224 199903 1 002



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIHKELAS II Jalan Negara Gunung Sugih

Telp. (0725) 529858 – 529859 Website: www.pn-gunungsugih.go.id Email: gunungsugih.pn@gmail.com

GunungSugih - Kab. Lampung Tengah (34161)

LAPORAN PELAYANAN MEJA INFORMASI

BULAN: JANUARI S/D DESEMBER 2019

No	Bulan	Laporan		Permohonan Ya	ng Dikabulkan	l	Permohonan Yang Di Tolak			
		Jumlah Pemohon	Perkara Dan Putusan	Pengawasan Dan Hukuman	Anggaran Dan Aset	Lainnya	Perkara Dan Putusan	Pengawasan Dan Hukuman	Anggaran Dan Aset	Lainnya
1	Januari	-	3	-	-	1	-	-	-	-
2	Februari	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	6	-	-	-	-	-	-	-
4	April	1	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	5	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	4	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	5	-	-	-	-	-	-	-
9	Septemb er	-	4	-	-	-	-	-	-	-
1	Oktober	-	6	-	-	-	-	-	-	-
0										
1	Novemb er	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1 2	Desemb er	-	5	-	-	1	-	-	-	-

MENGETAHUI GUNUNG SUGIH, 08 JANUARI 2020

KETUA PANITERA

SYAMSUL ARIEF, SH., MH RUSDIANA,SH.,MH

19760224 199903 1 002 19650213 198503 2 002



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIHKELAS II Jalan Negara Gunung Sugih Telp. (0725) 529858 – 529859 Website: www.pn-gunungsugih.go.id Email: gunungsugih.pn@gmail.com

GunungSugih - Kab. Lampung Tengah (34161)

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	1
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Pangadilan Tingkat Banding	NIHIL
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Ke Badan Pengawasan MARI	1
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	NIHIL
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LPH Disampaikan Ke Pangadilan Tingkat Banding	NIHIL
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LPH Disampaikan Ke Badan Pengawasan MARI	1

MENGETAHUI GUNUNG SUGIH, 08 JANUARI 2020

KETUA **PANITERA**

SYAMSUL ARIEF,SH.,MH RUSDIANA,SH.,MH

19760224 199903 1 002 19650213 198503 2 002



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIHKELAS II Jalan Negara Gunung Sugih

Telp. (0725) 529858 - 529859

Website: www.pn-gunungsugih.go.id Email: gunungsugih.pn@gmail.com

GunungSugih - Kab. Lampung Tengah (34161)

Nomor: W9.U7/ /Hk.00.00/1/2020 Gunung Sugih, 08 Januari 2020

Lampiran: 1 (Satu) Bundel

Perihal: Laporan Tahunan Pelayanan Informasi

Kepada Yth.

Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di –

<u>JAKARTA</u>

Dengan Hormat,

Sebagai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tertanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Dan Terlampir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tertanggal 05 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Maka dalam kesempatan ini Kami laporkan kepada Bapak mengenai Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

SYAMSUL ARIEF,S.H.,M.H. NIP.19760224 199903 1 002

Tembusan:

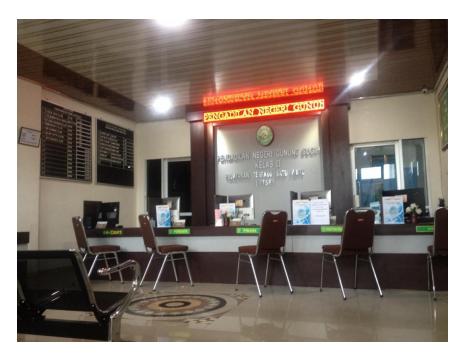
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Di Jakarta.
- 2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I Di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Di Bandar Lampung.
- 4. Arsip

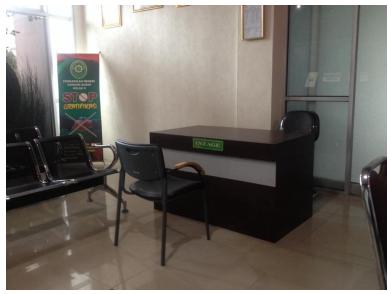
BAB V INOVASI

A. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perintah Mahkamah Agung kepada Peradilan dibawahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau. Perubahan sistem yang awalnya manual menjadi PTSP tersebut dilaksanakan secara terintegritasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Pada awalnya di ruang tunggu/lobby Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang tersedia adalah meja informasi dan meja pengaduan. Artinya, pelayanan surat masuk, sita geledah, pendaftaran CV dan lainnya masih dilakukan di masing-masing ruang yang bersangkutan. Saat ini sudah tersedia meja pelayanan PTSP dengan 5 meja pelayanan. Gambar 1. Kondisi meja pelayanan sebelum ada fasilitas lengkap untuk aplikasi PTSP.





Aplikasi Antrian dan Aplikasi Survey Kepuasan Pelanggan



Jadwal Persidangan

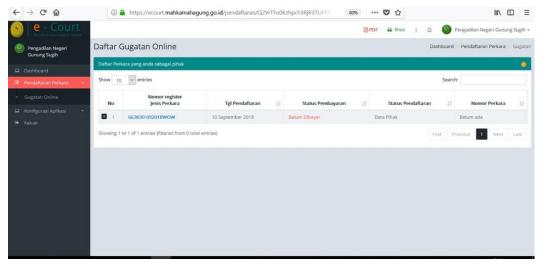


Bukti nomor antrian



Monitor untuk pemanggilan antrian

Aplikasi E-Court



B. Akses Kontrol Elektronik

Akses dapat diartikan sebagai tindakan memasuki atau menggunakan. Dalam bidang keamanan, Akses control adalah akses pembatasan ke suatu tempat atau sumber daya lainnya. Definisi akses control biasanya merujuk pada praktek pembatasan pintu masuk ke suatu property, bangunan, atau runagan hanya untuk orang yang berwenang.

Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam semangat pembaruan, menerapkan Akses Kontrol Elektronik untuk meningkatkan keamanan bagi Hakim dan Pegawai. Akses Kontrol Elektronik yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih menggunakan Akses Kontrol Pintu. Akses Kontrol Pintu berupa keypad untuk memasukkan kode, card reader dan menggunakan mesin pembaca finger print.



5 (lima) buah alat kontrol acces door lock elektronik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

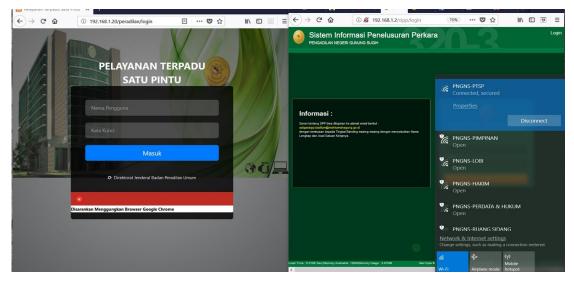




Ruang sidang

C. Penambahan Jaringan dan Peningkatan Kinerja SIPP

Penambahan dan pemisahan Jaringan adalah salah satu cara untuk menguatan jaringan dan juga meminimalisir eror dan lambatnya jaringan internet.



Penambahan Jaringan ini juga berdampak positif bagi kinerja SIPP PN Gunung Sugih. SIPP PN Gunung Sugih mengalami peningkatan kinerja pada Tahun 2019.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berupaya terusmenerus untuk memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan, terlebih lagi dengan telah diterimanya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor: 1505/DJU/SK/OT.01.3/7/2018 dengan akreditasi A(Excellent), diharapkan akan semakin memacu Pimpinan bersama dengan jajaran Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Beberapa program kegiatan inovasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gunung Sugihsebagaimanayang telah dipaparkan dalam penjelasan diatas adalahbentuk komitmen kerja di Pengadilan Nageri Gunung Sugih dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

B. Rekomendasi

Dimasa yang akan datang diharapkan jajaran Pengadilan Negeri Gunung Sugih utamanya para Hakim dan Kepaniteraan mampu menyelesaikan urusan *core buissnes* yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara. Diharapkan pada tahun mendatang adanya penambahan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian rasio perkara dengan standar Kepatuhan, Kelengkapan dan Kesesuaian yang lebih maksimal.

Demikian pula diharapkan pada tahun-tahun mendatang Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menambah jumlah pegawai, honorer dan anggaran di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sehingga pelayanan prima bagi pencari keadilan akan tetap terjaga bahkan lebih meningkat lagi dengan dibarengi bertambahnya inovasi-inovasi teknologi dan kinerja di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.